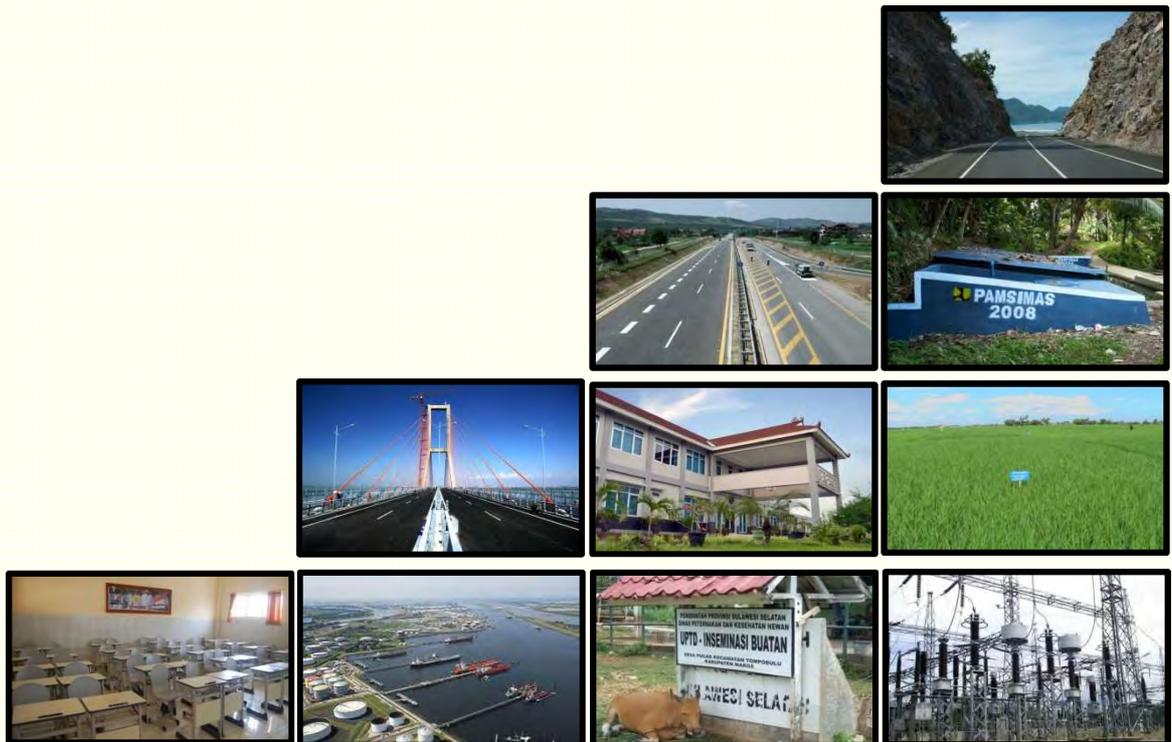




Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

**Edisi Triwulan II
Tahun 2012**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri ini merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 77 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Laporan ini berisi informasi mengenai gambaran umum pelaksanaan pinjaman luar negeri, kinerja penyerapan, kinerja pelaksanaan pinjaman yang meliputi pencapaian output, status/permasalahan dan tindak lanjut, pemantauan lapangan, kinerja pelaksanaan hibah, evaluasi laporan proyek yang telah selesai serta diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Laporan ini diolah berdasarkan hasil (i) Rapat pemantauan triwulanan yang diselenggarakan di Bappenas, (ii) Laporan pelaksanaan kegiatan dari K/L selaku instansi penanggung jawab pinjaman luar negeri (penyerapan dana dan pencapaian output), (iii) Laporan dari pemberi pinjaman, (iv) informasi dari instansi terkait lainnya, serta (v) kunjungan lapangan. Penyesuaian realisasi penyerapan pinjaman luar negeri telah dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan.

Pada edisi Triwulan II Tahun Anggaran 2012, pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya adalah sebesar USD 24.486,9 juta. Nilai pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman program (*program loan*) sebesar USD 443,0 juta dan pinjaman proyek (*project loan*) sebesar USD 24.043,9 juta yang terdiri dari *soft loan* sebesar USD 11.525,1 juta, pinjaman Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) sebesar USD 5.630,6 juta dan pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) sebesar USD 6.888,2 juta.

Sampai dengan Triwulan II TA 2012, penarikan kumulatif pinjaman program mencapai USD 292,0 juta (65,9%) dari total rencana penarikan pinjaman program, sedangkan penarikan kumulatif pinjaman proyek mencapai USD 9.558,6 juta (39,8%). Realisasi penarikan pinjaman proyek pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai USD 725,4 juta atau sebesar 19,1% dari target yang direncanakan sebesar USD 3.792,0 juta. Dengan demikian terdapat tambahan sebesar 12,1% dari capaian realisasi Triwulan I TA 2012. Pada TA 2012 ini terdapat tambahan proyek yang baru efektif sebanyak 6 proyek dan tidak ada proyek yang tutup. Pada Triwulan II TA 2011, proyek yang masih aktif berjumlah 165 proyek sedangkan pada Triwulan II TA 2012 proyek yang aktif sebanyak 183 proyek. Proyek yang baru efektif tersebut tidak melakukan penarikan yang besar.

Selain itu, perbaikan kinerja pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri ditunjukkan dengan semakin menurunnya persentase permasalahan yang terjadi pada masing-masing proyek dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2011. Penurunan persentase permasalahan adalah pada masalah finansial, procurement, NOL, *backlog* dan pembebasan lahan. Peningkatan kinerja juga

telah diupayakan oleh Bappenas bersama *Development Partner* melalui *Country Portfolio Review Mission (CPRM)* ADB, *Country Performance Portfolio Review (CPPR)* Bank Dunia, dan *Islamic Development Bank (IDB) Procurement Workshop and Clinics*.

Pada edisi ini juga dilaporkan mengenai pemantauan terhadap kinerja pencapaian output beberapa proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Pengukuran kinerja pelaksanaan pencapaian output dilakukan berdasarkan pencapaian indikator output yang telah dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan. Secara operasional pengukuran kinerja pelaksanaan dimulai dengan penyusunan pernyataan kinerja pencapaian output.

Penyempurnaan laporan terus dilakukan, dalam edisi ini laporan atas pencapaian output disajikan lebih ringkas agar lebih mudah dipahami. Selain itu, telah ditambahkan laporan kinerja pelaksanaan hibah luar negeri dan evaluasi atas laporan proyek yang telah tutup.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri pada Triwulan II Tahun Anggaran 2012.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas**

Armida S. Alisjahbana

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I Gambaran Umum Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri	1
1.1 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman	1
1.2 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman	2
BAB II Kinerja Penyerapan Pinjaman Luar Negeri.....	3
2.1 Pinjaman Program	4
2.2 Pinjaman Proyek	4
2.3 Kinerja Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman	6
2.4 Kinerja Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab	7
BAB III Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri	10
3.1 Kinerja Pencapaian Output	10
3.1.1 Pinjaman Bank Dunia 4205-IND <i>Early Childhood Education and Development</i>	10
3.1.2 Pinjaman Bank Dunia 4789-IND <i>Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project</i>	12
3.1.3 Pinjaman ADB 2285-INO <i>Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction (SAFVER)</i>	14
3.1.4 Pinjaman ADB 2416-INO <i>Indonesia Vocational Education Strengthening (INVEST)</i>	15
3.1.5 Pinjaman JICA IP-542 <i>Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province</i>	16
3.1.6 Pinjaman JICA IP-550 <i>Denpasar Sewerage Development II</i>	16
3.2 Progres Varian	17
3.3 Status dan Permasalahan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri....	19
3.3.1 Isu Umum	19
3.3.2 Isu Spesifik	20
3.3.3 Tinjauan Portofolio	21
3.3.3.1 <i>Country Portfolio Review Mission (CPRM) ADB</i>	21
3.3.3.2 <i>Country Performance Portfolio Review (CPPR) Bank Dunia</i>	22
3.3.3.3 <i>IDB Procurement Workshop and Clinic</i>	25

BAB IV	Pemantauan Lapangan	28
4.1.	Pinjaman ADB 1982-INO <i>Renewable Energy Development</i> PLTA Genyem	28
4.2	Pinjaman Bank Dunia 4786-IND <i>Urban Sector Development</i> <i>Reform</i>	30
4.3	Pinjaman Bank Dunia 4205-IND <i>Early Childhood Education</i> <i>and Development</i>	32
4.4	Pinjaman JICA IP-541 <i>Hasanuddin University Development</i>	34
BAB V	Kinerja Pelaksanaan Hibah Luar Negeri	37
5.1	Kinerja Pencapaian Output Hibah Luar Negeri	37
5.1.1	Hibah USAID <i>Aceh Road Reconstruction</i>	37
5.1.2	Hibah Belanda <i>Better Education Through Reformed Manage-</i> <i>ment and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU)</i>	38
5.1.3	Hibah Bank Dunia <i>Extending Telecommunication in Rural</i> <i>Indonesia</i>	41
5.1.4	Hibah ADB <i>Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR)</i>	42
5.1.5	Hibah Bank Dunia <i>Government Partnership Facility, CEC</i> <i>Corruption Prevention</i>	43
5.1.6	Hibah MDF dan Bank Dunia IRFF-AF	44
5.1.7	Hibah UNDP <i>Barrier Removal to The Cost Effective Develop-</i> <i>ment and Implementation of Energy Efficiency Standards and</i> <i>Labeling (BRESL)</i>	45
BAB VI	Evaluasi Laporan Proyek Yang Telah Selesai	47
6.1	PCR Pinjaman ADB 2184-INO <i>Road Rehabilitation-2</i>	47
6.2	ICR Pinjaman Bank Dunia 4790-IND <i>Initiatives for Local</i> <i>Governance Reform</i>	50
BAB VII	Penutup	53
7.1	Kesimpulan	53
7.2	Saran	54
	Daftar Istilah	55

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1	Pinjaman Proyek On Going, Baru dan Tutup Pada Triwulan I TA 2012 dan Triwulan II TA 2012	2
Tabel 2	Rekapitulasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri	3
Tabel 3	Perbandingan Realisasi Penarikan Periode 1 Januari – 30 Juni TA 2011 dan TA 2012	4
Tabel 4	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman	7
Tabel 5	Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri Menurut Instansi Penanggung Jawab	9
Tabel 6	Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan 4205-IND <i>Early Childhood Education and Development</i>	11
Tabel 7	Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan 4789-IND <i>Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project (IMHERE)</i>	13
Tabel 8	Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan 2285-INO <i>Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction (SAFVER)</i>	14
Tabel 9	Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan 2416-INO <i>Indonesia Vocational Education Strengthening</i>	15
Tabel 10	Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan IP-542 <i>ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province</i>	16
Tabel 11	Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan IP-550 <i>Denpasar Sewerage Development Project II</i>	17
Tabel 12	Pinjaman Proyek Dengan Progres Varian ≤ -30	17
Tabel 13	Tanggal Penerbitan DIPA-SLA.....	21
Tabel 14	Kinerja Pelaksanaan Proyek 4786-IND <i>Urban Sector Development</i>	30
Tabel 15	Pencapaian Indikator Kinerja Output Hibah <i>Infrastructure Reconstruction Financing Facility - AF</i>	45
Tabel 16	Gambaran Umum 2184-INO <i>Road Rehabilitation-2</i>	47
Tabel 17	Pencapaian Output Jalan dan Jembatan	48
Tabel 18	<i>Design and Monitoring Framework Road Rehabilitation-2</i> ..	49
Tabel 19	Gambaran Umum 4790-IND <i>Initiatives for Local Governance Reform</i> ..	51
Tabel 20	<i>Project Development Objective 4790-IND Initiatives for Local Governance Reform</i> ..	51

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1	Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman 1
Gambar 2	Perbandingan Jumlah Pinjaman Proyek Luar Negeri Triwulan I TA 2012 dan Triwulan II TA 2012 1
Gambar 3	Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman ...2
Gambar 4	Realisasi Penarikan Dana Pinjaman Proyek Pada TW II dan Per Tahun Anggaran 2007-20125
Gambar 5	Penarikan Kumulatif Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman7
Gambar 6	Realisasi Penarikan Per Tahun Berdasarkan Pemberi Pinjaman7
Gambar 7	Komposisi Jumlah Dana Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasar- kan Instansi Penanggung Jawab7
Gambar 8	Penarikan Kumulatif Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab8
Gambar 9	Realisasi Penarikan Per Tahun Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab8
Gambar 10	Perbandingan Persentase Permasalahan Triwulan II TA 2011 dan TA 2012..... 19
Gambar 11	<i>Commitment Charge</i> Proyek Pinjaman ADB21
Gambar 12	Proses Pengadaan Goods, Works and Services Berdasarkan IDB Guidelines26
Gambar 13	Proses Pengadaan Konsultan Berdasarkan IDB Guidelines.....26

DAFTAR ISTILAH

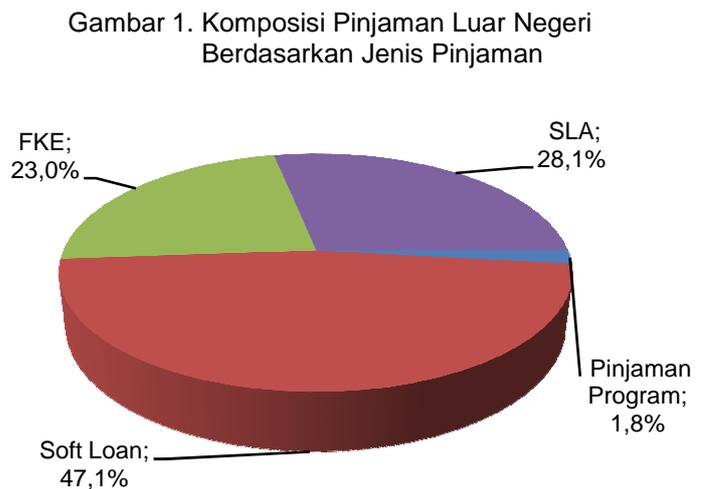
ADB	: Asian Development Bank
Backlog	: Pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman
Commitment Charge	: Beban yang dikenakan kepada peminjam per tahun atas pinjaman yang tidak dapat diserap yang diberlakukan 60 hari setelah penandatanganan pinjaman
Contingency Fund	: Dana cadangan
CPMU	: Central Project Management Unit
CPRM	: Country Portfolio Review Mission
FKE	: Fasilitas Kredit Ekspor
IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
ICR	: Implementation Completion Report
IDB	: Islamic Development Bank
IFAD	: International Fund for Agricultural Development
JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
JICA	: Japan International Cooperation Agency
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
MDF	: Multi Donor Fund
MOU	: Memorandum of Understanding
NOL	: No Objection Letter, persetujuan dari kreditor
P/Q	: Pre Qualification; tahap dalam proses untuk menentukan perusahaan yang akan ikut dalam proses lelang
PCR	: Project Completion Report; laporan yang dibuat ketika suatu proyek pinjaman telah selesai
Progress Varian	: Perbandingan (selisih) antara persentase realisasi penyerapan dana dibandingkan dengan persentase waktu pelaksanaannya
Replenishment	: Permintaan pembayaran ke rekening khusus
SF	: Special Fund
SLA	: Subsidiary Loan Agreement (perjanjian penerusan pinjaman)
Trust Fund	: Dana perwalian; dana yang diserahkan oleh negara-negara tertentu yang dianggap kredibel untuk disalurkan kepada sebuah negara yang dinilai memiliki keterbatasan untuk memobilisasi dana dari pihak asing dalam suatu kondisi yang luar biasa dan dalam waktu yang singkat
UNDP	: United Nations Development Programme
USAID	: United States Agency for International Development

BAB I

Gambaran Umum Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri

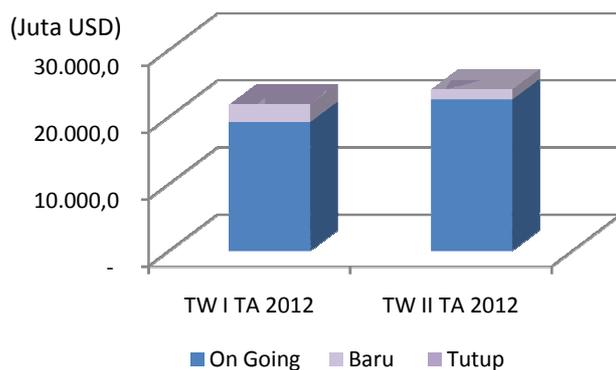
1.1. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Jenis Pinjaman

Total nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dan dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II TA 2012 berjumlah USD 24.486,9 juta. Nilai pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman program (*program loan*) sebesar USD 443,0 juta (1,8%) dan pinjaman proyek (*project loan*) sebesar USD 24.043,9 juta (98,2%). Penyaluran pinjaman tersebut dilakukan melalui mekanisme pinjaman lunak (*soft loan*) sebesar USD 11.525,1 juta (47,1%), mekanisme Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) sebesar USD 5.630,6 juta (23,0%) dan mekanisme *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) sebesar USD 6.888,2 juta (28,1%).



Sampai dengan Triwulan II TA 2012, nilai pinjaman proyek sebesar USD 24.043,9 juta mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai pinjaman proyek pada akhir Triwulan I TA 2012 sebesar USD 21.797,5 juta. Kenaikan ini disebabkan terdapat penambahan 6 proyek baru. Selain itu perbedaan penggunaan nilai tukar pada saat pelaporan juga turut mempengaruhi perubahan pada nilai pinjaman.

Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pinjaman Proyek Luar Negeri Triwulan I TA 2012 dan Triwulan II TA 2012



Ringkasan proyek on going, baru dan tutup pada Triwulan I TA 2012 dan Triwulan II TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

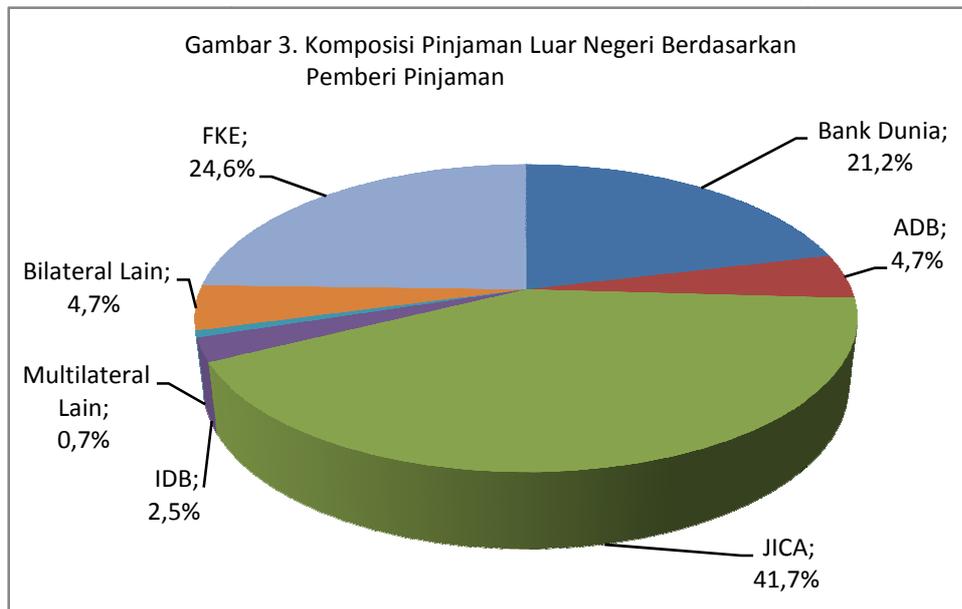
Tabel 1. Pinjaman Proyek *On Going*, Baru dan Tutup pada Triwulan I TA 2012 dan Triwulan II TA 2012

(dalam juta USD)

Kategori Proyek	TW I TA 2012		TW II TA 2012	
	Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
On Going	173	19.159,0	177	22.548,4
Baru	4	2.638,5	6	1.495,5
Tutup	-	-	-	-
Total	177	21.797,5	183	24.043,9

1.2. Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman

Berdasarkan sumber dananya, pinjaman luar negeri yang dipantau pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II TA 2012 berasal dari 6 kelompok pemberi pinjaman yaitu Bank Dunia dengan jumlah pinjaman sebesar USD 5.191,9 juta (21,2%), ADB sebesar USD 1.154,6 juta (4,7%), JICA sebesar USD 10.204,6 juta (41,7%), IDB sebesar USD 607,7 juta (2,5%), Multilateral Lain sebesar USD 166,9 juta (0,7%), Bilateral Lain sebesar USD 1.149,6 juta (4,7%), dan FKE sebesar USD 6.011,7 juta (24,6%).



BAB II

Kinerja Penyerapan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi penyerapan dana merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja pinjaman luar negeri. Penyerapan kumulatif pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan II TA 2012 USD 9.850,6 juta atau 40,2% dari total dana pinjaman sebesar USD 24.486,9 juta. Dengan demikian sisa dana pinjaman yang belum ditarik adalah sebesar USD 14.636,3 juta. Realisasi penarikan dana pada tahun anggaran berjalan periode 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai USD 1.017,4 juta¹ atau 24,0% dari target penarikan TA 2012 sebesar USD 4.235,0 juta².

Berdasarkan data penyerapan yang diterima dari pemberi pinjaman, diperoleh nilai penyerapan pinjaman yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan data dari Kementerian Keuangan. Tingginya realisasi penyerapan ini disebabkan metode pencatatan yang berbeda. Jika pemberi pinjaman langsung mencatatkan pembayaran sebagai *disbursement* maka sesuai ketentuan, Kementerian Keuangan akan menunggu sampai pembayaran dari pemberi pinjaman disahkan oleh Kantor KPPN menjadi dokumen SP3. Sesuai pemantauan, penerbitan dokumen SP3 membutuhkan waktu yang cukup lama.

Secara ringkas penyerapan pinjaman luar negeri sampai dengan 30 Juni 2012 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri

(dalam juta USD)

No.	Pinjaman	Jumlah Program/Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman belum ditarik	TA 2012		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1.	Pinjaman Program	3	443,0	292,0	65,9	151,0	443,0	292,0	65,9
2.	Pinjaman Proyek	183	24.043,9	9.558,6	39,8	14.485,3	3.792,0	725,4	19,1
	- Soft Loan	120	11.525,1	5.625,5	48,8	5.899,5	1.737,9	406,0	23,4
	- FKE	30	5.630,6	735,7	13,1	4.895,0	1.348,9	116,8	8,7
	- SLA	33	6.888,2	3.197,4	46,4	3.690,8	705,2	202,6	28,7
	Total	186	24.486,9	9.850,6	40,2	14.636,3	4.235,0	1.017,4	24,0

Sumber : Data Realisasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri Direktorat EAS, Kementerian Keuangan

Perbandingan realisasi penarikan pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni pada TA 2011 dan TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

¹ Realisasi penyerapan pinjaman luar negeri bersumber dari data Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan per 30 Juni 2012

² Berdasarkan DIPA TA 2012 (1 USD= 9.480)

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Penarikan Periode 1 Januari – 30 Juni TA 2011 dan TA 2012

(dalam juta USD)

No.	Jenis Pinjaman	Target 2011	Realisasi TW II TA 2011	%	Target 2012	Realisasi TW II TA 2012	%
1	Pinjaman Program	102,9	102,9	100,0	443,0	292,0	65,9
2	Pinjaman Proyek	3.703,7	1.106,2	29,9	3.792,0	725,4	19,1
	- Soft Loan	1.850,7	578,1	31,2	1.737,9	406,0	23,4
	- FKE	782,3	257,6	32,9	1.348,9	116,8	8,7
	- SLA	1.070,7	270,5	25,3	705,2	202,6	28,7
	TOTAL	3.806,6	1.209,1	31,8	4.235,0	1.017,4	24,0

Sumber : Data Realisasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri Direktorat EAS, Kementerian Keuangan

Dibandingkan dengan angka realisasi pada periode yang sama TA 2011, maka persentase realisasi total penarikan pinjaman pada Triwulan II TA 2012 mengalami penurunan dari 31,8% menjadi 24,0%. Kontribusi terbesar penurunan persentase angka penarikan terdapat pada pinjaman program, hal ini dikarenakan pada TA 2011 pinjaman program diasumsikan langsung habis terserap sedangkan pada TA 2012 didasarkan pada data penyerapan di Kementerian Keuangan yang sampai dengan Triwulan II TA 2012 mencapai USD 292,0 juta.

2.1. Pinjaman Program

Pada TA 2012 direncanakan terdapat 3 pinjaman program yang bersumber dari Bank Dunia dengan total nilai pinjaman sebesar USD 443,0 juta. Sampai dengan akhir Triwulan II TA 2012, realisasi penarikan dana pinjaman program mencapai USD 292,0 juta atau sebesar 65,9% dari target yang direncanakan.

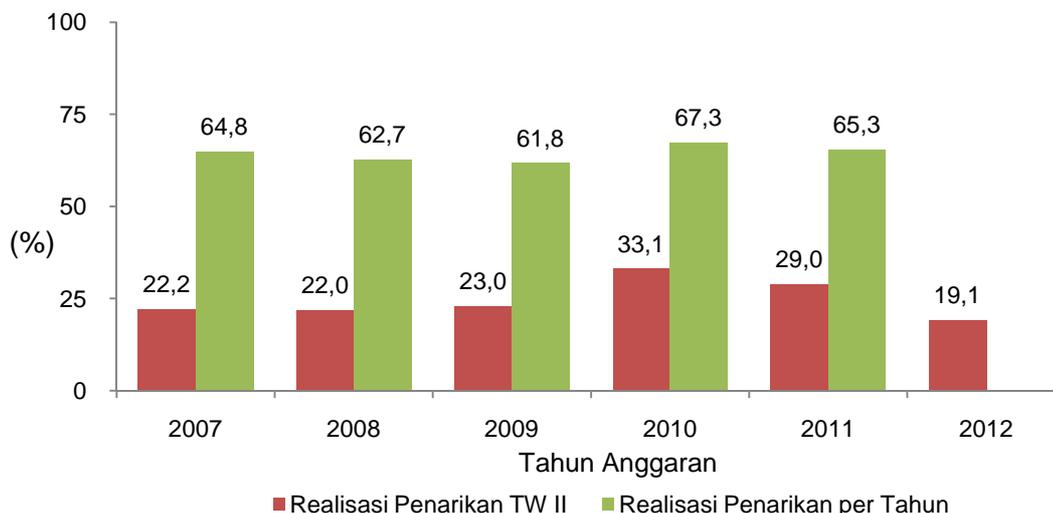
Rendahnya realisasi penarikan ini disebabkan target penarikan pinjaman program merupakan proyeksi dalam APBN 2012 dimana proyeksi penarikan pinjaman program dihitung dengan menggunakan sejumlah asumsi makro ekonomi. Pinjaman program yang ada bersifat *fast disbursement* dan berfungsi sebagai penutup defisit *balance of payment* (BOP).

2.2. Pinjaman Proyek

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, penarikan dana dari 183 pinjaman proyek yang sedang berjalan pada Triwulan II TA 2012 secara kumulatif mencapai USD 9.558,6 juta (39,8%). Dengan demikian dana pinjaman proyek yang belum ditarik berjumlah sebesar USD 14.485,3 juta (60,2%). Realisasi penarikan dana pinjaman proyek pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai USD 725,4 juta atau sebesar 19,1% dari target yang direncanakan dalam DIPA TA 2012 yaitu sebesar ekivalen USD 3.792,0 juta. Pinjaman proyek ini dilaksanakan melalui skema pinjaman lunak (*soft loan*), pinjaman fasilitas kredit ekspor (FKE) dan skema *Subsidiary Loan Agreement* (SLA).

Gambaran realisasi penarikan pinjaman proyek pada Triwulan II dan pada setiap akhir tahun anggaran dari TA 2007 sampai dengan TA 2012 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4. Realisasi Penarikan Dana Pinjaman Proyek Pada TW II dan Per Tahun Anggaran 2007-2012



Dari Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa pinjaman proyek yang dilaksanakan dengan skema pinjaman lunak (*soft loan*) sampai dengan Triwulan II TA 2012 berjumlah 120 proyek dengan nilai pinjaman sebesar USD 11.525,1 juta. Penarikan kumulatif pinjaman lunak sampai dengan Triwulan II TA 2012 mencapai USD 5.625,5 juta (48,8%), sehingga dana pinjaman lunak yang belum ditarik berjumlah USD 5.899,5 juta (51,2%). Realisasi penarikan dana pinjaman lunak pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai sebesar USD 406,0 juta atau 23,4% dari target yang direncanakan yaitu sebesar USD 1.737,9 juta. Hal ini dikarenakan adanya beberapa hal yang menghambat pelaksanaan proyek sehingga berakibat rendahnya penyerapan, diantaranya adalah masalah pembebasan lahan dan pengadaan barang/jasa. Informasi lebih lengkap mengenai permasalahan pada pelaksanaan proyek dapat dilihat pada BAB III.

Pinjaman proyek yang dilaksanakan dengan skema pinjaman FKE sampai dengan Triwulan II TA 2012 berjumlah 30 proyek/alokasi dengan nilai pinjaman sebesar USD 5.630,6 juta. Dari Tabel 2 terlihat bahwa penarikan kumulatif pinjaman FKE sampai dengan Triwulan II TA 2012 mencapai USD 735,7 juta (13,1%), sehingga dana pinjaman FKE yang belum ditarik berjumlah USD 4.895,0 juta (86,9%). Realisasi penarikan dana pinjaman FKE pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai USD 116,8 juta atau 8,7% dari target yang direncanakan yaitu sebesar USD 1.348,9 juta.

Rendahnya pencapaian penarikan proyek dengan skema pendanaan FKE disebabkan antara lain DIPA untuk beberapa proyek kelistrikan masih dalam tanda bintang, proses tender yang masih berjalan dan belum selesainya proses negosiasi

Loan Agreement untuk beberapa proyek. Selain itu dapat diinformasikan bahwa target penarikan proyek FKE pada Kementerian Pertahanan dan POLRI menggunakan angka proyeksi yang bersumber dari alokasi FKE.

Pinjaman yang dilaksanakan dengan skema *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) sampai dengan Triwulan II TA 2012 berjumlah 33 proyek dengan nilai sebesar USD 6.888,2 juta. Dari Tabel 2 terlihat penarikan kumulatif pinjaman SLA pada Triwulan II TA 2012 mencapai USD 3.197,4 juta (46,4%), sehingga dana pinjaman SLA yang belum ditarik berjumlah USD 3.690,8 juta (53,6%). Realisasi penarikan dana pinjaman SLA pada periode 1 Januari sampai dengan 30 juni 2012 mencapai USD 202,6 juta atau 28,7% dari target yang direncanakan yaitu sebesar USD 705,2 juta.

Hal ini dikarenakan adanya hambatan berupa DIPA yang masih diblokir sehingga memperlambat penyerapan proyek.

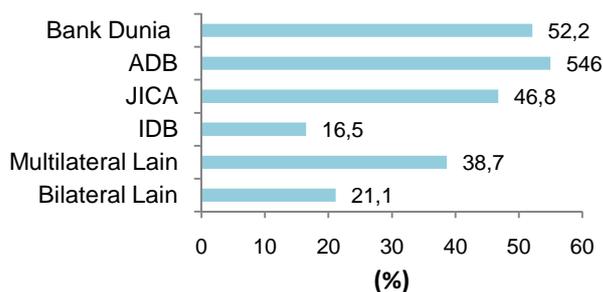
2.3. Kinerja Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman

Berdasarkan persentase realisasi penarikan kumulatif terhadap jumlah pinjaman sampai dengan Triwulan II TA 2012, persentase penarikan kumulatif ADB adalah yang tertinggi yaitu mencapai 54,6%, diikuti dengan Bank Dunia sebesar 52,2% dan JICA sebesar 46,8%. Sementara persentase penarikan kumulatif terendah adalah pada pinjaman IDB sebesar 16,5%. Rendahnya penarikan kumulatif pinjaman proyek IDB disebabkan sampai dengan saat ini 26 proyek yang baru efektif di tahun 2011 realisasi penyerapannya masih nol. Selain itu, pelaksanaan proyek IDB rata-rata mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

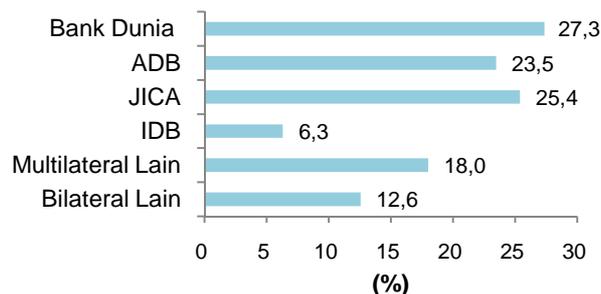
Berdasarkan persentase realisasi penarikan dana Triwulan II TA 2012 terhadap target TA 2012, proyek dari sumber Bank Dunia memiliki persentase realisasi penarikan tertinggi, yaitu sebesar 27,3%, diikuti oleh JICA sebesar 25,4% dan ADB sebesar 23,5%. Sedangkan proyek-proyek dari sumber dana IDB memiliki persentase realisasi penarikan terendah dibandingkan dengan target TA 2012 dengan hanya mencapai sebesar 6,3%.

Komposisi kinerja penyerapan pinjaman proyek berdasarkan pemberi pinjaman dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Gambar 5. Penarikan Kumulatif Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman



Gambar 6. Realisasi Penarikan Per Tahun Berdasarkan Pemberi Pinjaman



Secara ringkas kinerja penyerapan pinjaman proyek luar negeri sampai dengan Triwulan II TA 2012 berdasarkan pemberi pinjaman dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Pemberi Pinjaman

(dalam juta USD)

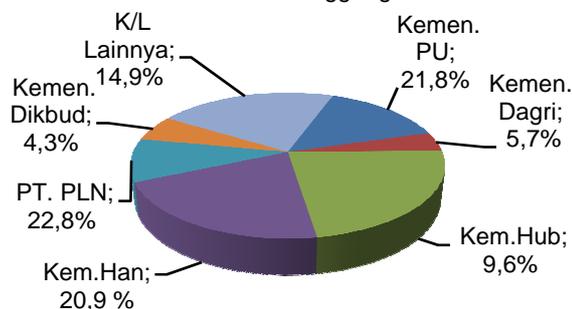
No.	Pemberi Pinjaman	Jumlah Proyek	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2012		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
1	Bank Dunia	28	4.748,9	2.476,6	52,2	2.272,3	528,2	144,4	27,4
2	ADB	20	1.154,6	630,8	54,6	523,8	256,4	60,2	23,5
3	JICA	49	10.204,6	4.773,3	46,8	5.431,4	1.175,3	298,4	25,4
4	IDB	26	607,7	100,1	16,5	507,5	133,1	8,4	6,3
5	Multilateral Lain	4	166,9	64,5	38,7	102,4	11,0	2,0	18,0
6	Bilateral Lain	20	1.149,6	483,7	42,1	665,9	268,9	46,1	17,1
7	FKE	36	6.011,7	1.029,6	17,1	4.982,1	1.419,2	165,9	11,7
Total		183	24.043,9	9.558,6	39,8	14.485,3	3.792,0	725,4	19,1

Sumber : Data Realisasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri Direktorat EAS, Kementerian Keuangan

2.4. Kinerja Penyerapan Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab

Pada Triwulan II TA 2012 terdapat 23 Kementerian/ Lembaga/ BUMN yang menjadi instansi penanggung jawab (*Executing Agency*) atas 183 pinjaman proyek luar negeri yang sedang berjalan. Sebagian besar pinjaman luar negeri tersebut (85% jumlah pinjaman) dikelola oleh 6 instansi pelaksana, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta PT. PLN.

Gambar 7. Komposisi Jumlah Dana Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



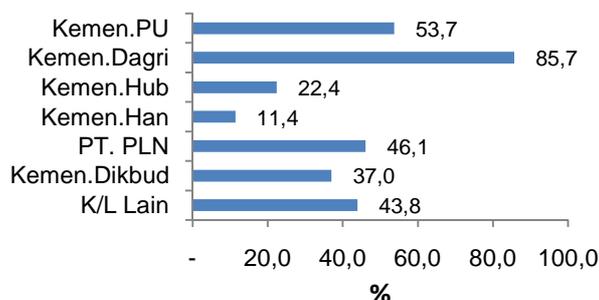
Dari total dana pinjaman proyek luar negeri sebesar USD 24.043,9 juta, PT. PLN adalah instansi penanggung jawab dengan jumlah dana pinjaman terbesar yaitu USD 5.484,1 juta (22,8%), diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan jumlah dana pinjaman sebesar USD 5.237,5 juta (21,8%) dan Kementerian Pertahanan dengan jumlah dana pinjaman sebesar USD 5.024,0 juta (20,9%).

Dari 6 instansi penanggung jawab dengan jumlah pinjaman terbesar tersebut, persentase realisasi penarikan kumulatif dana pinjaman proyek tertinggi dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri sebesar 85,7% dari jumlah pinjamannya, diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 53,7% dan PT. PLN sebesar 46,1%. Kinerja penarikan kumulatif pada 6 instansi dengan pinjaman terbesar tersebut dapat diikuti pada Gambar 8.

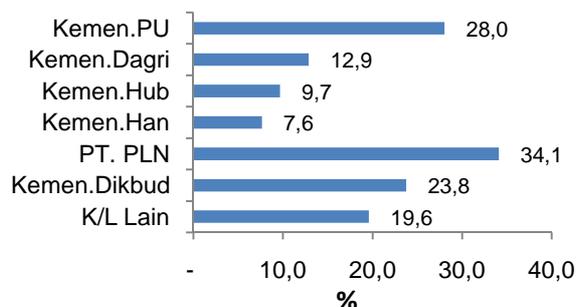
Tingginya realisasi penarikan kumulatif pada Kementerian Dalam Negeri disebabkan pada saat ini Kemendagri hanya mengelola 3 proyek pinjaman yang seluruhnya tergolong Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dari tiga proyek tersebut, satu proyek yaitu PNPM 3 (7867-ID) telah menarik 100% dananya. Proyek PNPM umumnya merupakan *block grant* sehingga penyerapannya tinggi. Sementara itu Kem. PU dan PT. PLN saat ini mengelola masing-masing sebanyak 41 proyek dan 27 proyek. Keseluruhan proyek yang dikelola oleh kedua *executing agency* tersebut adalah dibidang infrastruktur dan energi.

Namun, apabila ditinjau berdasarkan persentase realisasi penarikan dana pada Triwulan II (periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2012) terhadap target TA 2012, PT. PLN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan instansi penanggung jawab dengan persentase realisasi tertinggi dengan capaian masing-masing sebesar 34,1%, 28,0% dan 23,8%. Sementara itu Kementerian Pertahanan merupakan instansi penanggung jawab yang paling rendah realisasinya. Rendahnya realisasi penarikan tersebut antara lain disebabkan adanya persyaratan tender yang belum terpenuhi sehingga harus *retender*.

Gambar 8. Penarikan Kumulatif Pinjaman Proyek Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



Gambar 9. Realisasi Penarikan Per Tahun Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab



Rekapitulasi pelaksanaan pinjaman proyek luar negeri berdasarkan Instansi Penanggung Jawab sampai dengan Triwulan II TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri Menurut Instansi Penanggung Jawab

(dalam juta USD)

No	Instansi Penanggung Jawab	Jumlah Proyek/ Program	Jumlah Pinjaman	Penarikan Kumulatif		Pinjaman Belum Ditarik	TA 2012		
				Jumlah	%		Target	Realisasi	%
A.	Kementerian/Lembaga	150	17.155,7	6.361,2	37,1	10.794,5	3.086,8	522,8	16,9
1	Kementerian Dalam Negeri	3	1.379,7	1.181,9	85,7	197,8	99,7	12,8	12,9
2	Kementerian Pertahanan	26	5.024,0	571,0	11,4	4.453,0	1.215,4	93,0	7,6
3	Kementerian Keuangan	2	170,0	25,6	15,0	144,4	24,1	-	-
4	Kementerian Pertanian	4	176,5	106,6	60,4	69,9	18,6	4,8	25,7
5	Kementerian Perhubungan	16	2.305,5	516,3	22,4	1.789,2	298,9	28,9	9,7
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	23	1.029,7	380,8	37,0	648,9	244,0	58,0	23,8
7	Kementerian Kesehatan	9	288,7	180,2	62,4	108,5	54,1	26,4	48,8
8	Kementerian Agama	8	182,4	99,9	54,8	82,5	26,8	7,0	26,2
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4	139,7	65,8	47,1	73,9	37,2	12,7	34,1
10	Kementerian Pekerjaan Umum	41	5.237,5	2.813,3	53,7	2.424,2	825,6	231,4	28,0
11	Badan Pusat Statistik	1	65,0	-	-	65,0	9,8	-	-
12	Bappenas	3	262,9	86,5	32,9	176,4	33,3	6,5	19,5
13	Kementerian Kominfo	1	36,7	11,1	30,3	25,6	4,9	3,5	71,2
14	Kepolisian Republik Indonesia	4	606,6	164,6	27,1	442,0	133,4	23,9	17,9
15	Lemhanas	1	9,2	6,4	70,1	2,8	5,0	2,3	45,0
16	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1	105,2	103,8	98,7	1,4	1,4	-	-
17	BMKG	1	37,7	-	-	37,7	18,3	-	-
18	LIPI	1	18,3	11,3	61,8	7,0	10,9	5,0	46,1
19	Bakosurtanal	1	80,4	36,0	44,7	44,4	25,4	6,7	26,4
B.	SLA	33	6.888,2	3.197,4	46,4	3.690,8	705,2	202,6	28,7
20	PT. PLN	27	5.484,1	2.525,6	46,1	2.958,5	581,0	198,1	34,1
21	PT. PGN	2	688,8	671,8	97,5	17,0	6,3	4,5	71,7
22	PT. Pertamina	2	515,3	-	-	515,3	7,5	-	-
23	PT. Sarana Multi Infrastruktur	2	200,0	-	-	200,0	110,5	-	-
	Total	183	24.043,9	9.558,6	39,8	14.485,3	3.792,0	725,4	19,1

Sumber: Data Realisasi Penyerapan Pinjaman Luar Negeri Direktorat EAS, Kementerian Keuangan

BAB III

Kinerja Pelaksanaan Pinjaman Proyek Luar Negeri

3.1. Kinerja Pencapaian Output

Dalam rangka mengukur kinerja pelaksanaan pencapaian output pinjaman luar negeri, maka instansi pelaksana proyek telah diminta untuk melaporkan pencapaian kinerja pelaksanaan proyek yang diukur dengan menggunakan indikator output. Pengukuran kinerja pelaksanaan pencapaian output sudah dimulai pada edisi Triwulan I TA 2012. Pada edisi Triwulan II TA 2012 ini ditampilkan 6 proyek yang terdiri atas 2 proyek Bank Dunia yaitu *loan 4205-IND Early Childhood Education and Development* dan *loan 4789-IND Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project (IMHERE)*, 2 proyek ADB yaitu *loan 2285-INO Sustainable Aquaculture Development for Food Security and Poverty Reduction (SAFVER)* dan *loan 2416-INO Indonesia Vocational Education Strengthening*, serta 2 proyek JICA yaitu *loan IP-542 Utilization Project for Educational Quality Enhancement* dan *loan IP-550 Denpasar Sewerage Development II*.

3.1.1. Pinjaman Bank Dunia 4205-IND *Early Childhood Education and Development*

Proyek *loan 4205-IND Early Childhood Education and Development* bertujuan untuk meningkatkan proporsi anak dari keluarga miskin yang siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya melalui partisipasi dalam program pendidikan pengembangan anak usia dini yang efektif dan berkualitas serta memperlancar perkembangan anak usia dini yang holistik melalui mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Proyek ini terdiri atas 3 komponen, yaitu (1) Meningkatkan pelayanan PPAUD terpadu kepada masyarakat miskin, (2) Melaksanakan pengembangan sistem yang berkesinambungan untuk PAUD yang berkualitas, dan (3) Melaksanakan manajemen, pemantauan dan evaluasi proyek yang efektif.

Secara keseluruhan proyek yang telah memasuki tahun ketujuh masa pelaksanaan sejak tahun 2006 dan akan berakhir tahun 2013 memiliki progres yang cukup baik. Dari 9 indikator kinerja output yang ditargetkan, 6 indikator kinerja output sudah tercapai pada akhir tahun 2011, sehingga pada TA 2012 sampai dengan *closing date* hanya tersisa 3 indikator output yang harus diselesaikan, yaitu (1) Jumlah Anak Usia Dini (AUD) miskin yang terdaftar di layanan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), (2) Jumlah kabupaten yang telah mengeluarkan regulasi yang mendukung Program PAUD, dan (3) Jumlah desa yang melakukan pemantauan berbasis masyarakat.

Dari ketiga indikator output tersebut, pencapaian pada Triwulan II TA 2012 adalah: (1) Terdapat tambahan 147.806 AUD miskin terdaftar di layanan TPK sehingga sampai dengan Triwulan II TA 2012 telah tercapai 211.711 AUD miskin terdaftar di layanan TPK atau 115% dari target TA 2012 (184.722 anak). Secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II TA 2012 telah tercapai 571.591 AUD yang terdaftar atau 77% dari target total sebesar 738.888 AUD. Pencapaian ini telah melebihi target 75% yang hendak dicapai sampai dengan akhir TA 2012. (2) Tidak ada tambahan kabupaten yang mengeluarkan regulasi dalam mendukung Program PAUD. Pencapaian ini dibawah target yang direncanakan sampai dengan Triwulan II TA 2012, yaitu telah tercapai 27% atau 1-2 kabupaten dari target TA 2012 (7-8 kabupaten). Secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II TA 2012 telah tercapai 35 kabupaten atau 75% dari target total sebesar 50 kabupaten, dimana sampai dengan akhir TA 2012 ditargetkan mencapai 42-43 desa atau 87% dari target total. (3) Tidak ada tambahan desa yang melakukan pemantauan berbasis masyarakat. Pencapaian ini dibawah target yang direncanakan sampai dengan Triwulan II TA 2012, yaitu tercapai 360 desa atau 50% dari target TA 2012 (720 desa). Secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II TA 2012 telah tercapai 1.680 desa atau 56% dari target total sebesar 3.000 desa, dimana sampai dengan akhir TA 2012 ditargetkan mencapai 2.400 desa atau 85% dari target total.

Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja Output *Loan 4205-IND Early Childhood Education and Development*

Masa Laku: 11/12/2006 - 31/12/2013

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW II	%
A	Meningkatkan layanan PPAUD terpadu kepada masyarakat miskin					
1	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerima sosialisasi tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD)	6.000	Kelompok	Target total sebesar 6.000 kelompok masyarakat sudah tercapai 100% pada TA 2011		
2	Jumlah kelompok masyarakat yang menyerahkan pernyataan minat dalam PPAUD (di-representasikan dengan penyerahan Rencana Kerja Masyarakat/RKM kepada <i>District</i> PIU)	6.000	Kelompok	Target total sebesar 6.000 kelompok masyarakat sudah tercapai 100% pada TA 2010		
3	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima <i>Block Grants</i>	6.000	Kelompok	Target total sebesar 6.000 kelompok masyarakat sudah tercapai 100% pada TA 2011		
4	Jumlah AUD miskin yang terdaftar di layanan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	738.888	Anak	184.722	211.711	115
B	Mengembangkan sistem Program PPAUD yang berkualitas dan berkelanjutan					
5	Jumlah kabupaten yang memiliki pelatih telah mengikuti program pelatihan PAUD	50	Kabupaten	Target total sebesar 50 kabupaten sudah tercapai 100% pada TA 2008		
6	Jumlah lembaga yang memiliki standar Layanan PAUD dan menjadi Pusat PAUD percontohan	500	Lembaga	Target total sebesar 500 lembaga sudah tercapai 100% pada TA 2011		
7	Jumlah Kabupaten yang telah mengeluarkan regulasi yang mendukung Program PAUD	50	Kabupaten	7-8	-	-

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW II	%
C	Pengembangan Pengelolaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program yang Efektif					
8	Jumlah desa yang melakukan pemantauan berbasis masyarakat (tahunan)	3.000	Desa	720	-	-
9	Jumlah kelompok masyarakat yang telah menyampaikan laporan rutin ke kabupaten (<i>District PIU</i>)	6.000	Kelompok	Target total sebesar 6.000 kelompok masyarakat sudah tercapai 100% pada TA 2011		

3.1.2. Pinjaman Bank Dunia 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project*

Proyek *loan* 4789-IND *Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project* bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perguruan tinggi negeri yang otonom dan akuntabel, dan mengembangkan mekanisme pendukung yang efektif untuk meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi dan kesetaraan pendidikan tinggi.

Pada tataran universitas, rencana program I-MHERE meliputi *outreach* dan *community development*. *Outreach* adalah program peningkatan jumlah mahasiswa dari latar belakang kurang mampu secara ekonomi dengan penyediaan beasiswa, serta upaya memperpendek masa skripsi dengan menyediakan hibah penelitian mahasiswa. Sedangkan *community development* adalah program peningkatan relevansi dan memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan industri yang menguntungkan kedua belah pihak.

Secara keseluruhan proyek yang telah memasuki tahun kedelapan masa pelaksanaan sejak tahun 2005 dan akan berakhir tahun 2012 memiliki progres yang cukup baik. Dari 14 indikator output, 10 indikator telah tercapai targetnya sehingga hanya tersisa 4 indikator output yang masih dalam pelaksanaan.

Pencapaian keempat indikator tersebut pada Triwulan II TA 2012:

- a. Tersusunnya laporan *tracer study* lulusan perguruan tinggi secara reguler tercapai 80%. Pada saat ini *consultant firm* untuk desain instrumen sudah direkrut, sementara TA untuk implementasi baru akan dilaksanakan tahun 2012.
- b. Tersedianya data lulusan perguruan tinggi se-Indonesia tercapai 80%. Pada saat ini *tracer study* khusus *grantee* IMHERE sedang dalam tahap pengumpulan proposal dan pelaksanaan penugasan diperkirakan dimulai bulan Juli 2012.
- c. Indikator dikembangkannya proses belajar jarak jauh GDLN baru mencapai 40% dimana pada tahun 2011 terdapat penugasan untuk 20 paket hibah pengembangan konten pembelajaran online berbasis TIK dan finalisasi pekerjaan pada bulan Juni 2012.

- d. Indikator jumlah PTN yang menjadi pusat GDLN baru tercapai 2 PTN (ITB dan UGM) atau 33,3% dari target 6 PTN. Sedangkan untuk 4 sub center GDLN lainnya di Untan, Unila, ITS dan Unipa, walaupun proses pengadaan telah selesai namun karena dananya belum dialokasikan dalam DIPA 2012 maka kontrak pelaksanaan pekerjaannya ditunda. Kemungkinan kontrak baru akan dilaksanakan pada bulan Juli 2012.

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan 4789-IND Managing Higher Education for Relevance and Efficiency Project (IMHERE)

Masa Laku: 02/08/2005 – 31/12/2012

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW II	%
A	Modernisasi institusi pendidikan tinggi					
1	Tersusunnya laporan <i>tracer study</i> lulusan PT secara reguler	1	Kegiatan	1	0,8	80,0
2	Tersedianya data lulusan PT se-Indonesia	1	Kegiatan	1	0,8	80,0
B	BAN-PT					
1	Jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi	4	PT	Target total sebesar 4 Perguruan Tinggi sudah tercapai 100% pada tahun 2009		
2	Jumlah akreditasi profesi yang dibentuk	3	Profesi	3	3	100,0
C	Revitalisasi Universitas Terbuka					
1	Terlaksananya TA kajian opsi revitalisasi UT	2	TA	2	2	100,0
2	Jumlah Pusat Belajar Jarak Jauh Daerah yang terbentuk	30	Unit	Target total sebesar 30 unit sudah tercapai 100% pada tahun 2010		
3	Jumlah mahasiswa yang terlayani Pusat Belajar Jarak Jauh Daerah	2006	Mahasiswa	Target total sebesar 2006 mahasiswa sudah tercapai 100% pada tahun 2010		
4	Pengembangan dosen untuk studi S2 & S3 di luar negeri	5	Orang	Target total sebesar 5 orang dosen sudah tercapai 100%		
D	Global Development Learn Network (GDLN)					
1	Dikembangkannya proses belajar jarak jauh GDLN	1	Kegiatan	1	0,4	40,0
2	Jumlah PTN yang menjadi pusat GDLN	6	PTN	6	2	33,3
E	Block Grant dari Pinjaman					
1	Peningkatan kualitas, relevansi, dan tanggung jawab sosial	38	Perguruan Tinggi	Target total sebesar 38 PT sudah tercapai 100% pada tahun 2009		
2	Penguatan manajemen institusi pada universitas negeri non-BHMN	29	Perguruan Tinggi	Target total sebesar 29 PT sudah tercapai 100% pada tahun 2010		
3	Penguatan kapasitas manajemen PT BHMN	7	Perguruan Tinggi	Target total sebesar 7 PT sudah tercapai 100% pada tahun 2009		
4	Penguatan kapasitas manajemen PT BHMN (performance based contract)	5	Perguruan Tinggi	Target total sebesar 5PT sudah tercapai 100% pada tahun 2009		

3.1.3. Pinjaman ADB 2285-INO *Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction (SAFVER)*

Proyek ini terdiri atas 3 komponen pekerjaan, yaitu Budidaya Peningkatan Produksi, Layanan Pendukung Budidaya, serta Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Proyek. Pada pelaksanaannya 7 indikator output sudah direncanakan untuk tidak diselesaikan sampai dengan 100% yaitu: laboratorium kualitas air dan penyakit ikan yang dikembangkan (80%), jumlah penerima manfaat dengan input produksi (94%), jumlah kelompok perempuan dilayani oleh penyuluh (82%), Jalan dan jalur direhabilitasi (85%), Budidaya air tawar yang didirikan (89%), Budidaya Air Laut yang didirikan (90%), Tambak direhabilitasi dan dikelola (90%).

Pencapaian indikator kinerja output dari proyek 2285-INO *Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction (SAFVER)* sampai dengan Triwulan II TA 2012 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan 2285-INO *Sustainable Aquaculture Development For Food Security And Poverty Reduction (SAFVER)*

Masa laku: 15/07/2007 - 31/12/2013

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW II	%
A	Budidaya Peningkatan Produksi					
1	Jumlah rumah tangga terorganisir	14.000	Orang	3.573	2587	72,4
2	Tambak direhabilitasi dan dikelola (5700 direvisi menjadi 4100)	4.100	Ha	900	900	100
3	Keramba budidaya yang didirikan dan dikelola	300	Unit	80	80	100
4	Budidaya Air Payau yang didirikan	100	Unit	Target tercapai pada TA 2011		
5	Budidaya Air Laut yang didirikan	50	Unit	Target tercapai pada TA 2011		
6	Fasilitas kultur Rumput Laut yang dikembangkan (1 farmer/0.2 ha)	500	Ha	186	186	100
7	Kolam air tawar direhabilitasi atau didirikan	45	Ha	Target tercapai pada TA 2010		
8	Budidaya air tawar yang didirikan	100	Unit	42	42	100
9	Tempat penetasan ikan air tawar yang direhabilitasi dan didirikan	27	Unit	Target tercapai pada TA 2011		
10	fasilitas air yang disediakan	150	Unit	6	6	100
11	Jalan dan jalur direhabilitasi	60	Km	28	28	100
B	Budidaya Layanan Dukungan					
1	Jumlah kelompok dilayani oleh penyuluh	930	Grup	194	194	100
2	Jumlah kelompok perempuan dilayani oleh penyuluh	200	Grup	87	87	100
3	Jumlah penerima manfaat dengan input produksi	14.000	Orang	3.317	3317	100
4	Jumlah kegiatan penyuluhan yang dilakukan	300	Kali	1.835	1835	100

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW II	%
5	Laboratorium kualitas air dan penyakit ikan yang dikembangkan	5	unit	Hanya diselesaikan 4 unit		
C	Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Proyek					
1	Staf DGA dan DFS dilatih dalam akuakultur, lingkungan, Pengadaan, dll	45	Orang	20	20	100
2	Petugas penyuluh yang dibekali dengan pelatihan dan peralatan	70	Orang	Target tercapai pada TA 2011		
3	Pusat-pusat teknis Budidaya yang direnovasi	5	unit	Target tercapai pada TA 2011		

3.1.4. Pinjaman ADB 2416-INO *Indonesia Vocational Education Strengthening (INVEST)*

Pinjaman proyek ADB 2416-INO *Indonesia Vocational Education Strengthening* bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan bekerja bagi lulusan SMK. Lokasi pelaksanaan proyek ini terdiri atas 90 SMK Model dan 230 SMK Aliansi. Terdapat 2 indikator output utama dari proyek ini, yaitu (i) pengembangan SMK Model dan SMK Aliansi dan (ii) pelatihan guru. Untuk pengadaan peralatan SMK Aliansi telah mencapai 100% di 230 SMK pada TA 2011 demikian juga halnya dengan pelatihan guru telah mencapai 100% pada TA 2010. Sedangkan pengembangan fisik SMK Model, pengembangan non-fisik SMK Model dan pengadaan peralatan SMK Model direncanakan akan selesai pada TA 2013.

Pencapaian output pada proyek *Indonesia Vocational Education Strengthening* adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan 2416-INO *Indonesia Vocational Education Strengthening*

Masa laku: 9/06/2008 - 30/11/2013

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d. TW II	%
I	Program Pengembangan SMK Model dan SMK Aliansi					
1	Pengembangan Fisik (Civil Works) SMK Model	90	SMK	90	1	1
2	Pengembangan Non-Fisik (KBM) SMK Model	90	SMK	90	1	1
3	Pengadaan Peralatan SMK Model	90	SMK	90	3	3
4	Pengadaan Peralatan SMK Aliansi	230	SMK	Target tercapai pada TA 2011		
II	Pelatihan Guru					
1	Pelatihan Guru	14	kali	Target tercapai pada TA 2010		

3.1.5. Pinjaman JICA IP-542 *Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*

Proyek pinjaman JICA IP-542: *ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province* bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi khususnya di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peningkatan mutu pendidikan tersebut diwujudkan dalam pembangunan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) beserta jaringannya di 500 sekolah yang berada di 5 kota/kabupaten di provinsi DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Sampai dengan Triwulan II TA 2012, pemasangan peralatan TIK sudah dilaksanakan di 350 sekolah atau 70,0% dari target sebanyak 500 sekolah. Sisa 150 sekolah rencananya dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV TA 2012 dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2012 atau lebih cepat dari masa laku pinjaman yang akan berakhir di 2015. Tahun 2013 akan digunakan untuk menyelesaikan proses administrasi maupun keuangan dan diperkirakan akan ada sisa pinjaman sebesar JPY 1.488,8 juta dari total nilai pinjaman sebesar JPY 2.911,0 juta.

Tabel 10. Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan IP-542 *ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in Yogyakarta Province*

Masa Laku : 29/03/2007 – 29/05/2015

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW II	%
1	Terpasangnya peralatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) beserta jaringannya dalam rangka Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan di DIY	500	Sekolah	150	-	-

3.1.6. Pinjaman JICA IP-550 *Denpasar Sewerage Development II*

Proyek IP-550 *Denpasar Sewerage Development II* bertujuan untuk memperluas *coverage ratio* dari sistem pembuangan limbah dan membangun sistem operasi dan pemeliharaan dengan memperluas fasilitas pengolahan air limbah (pipa saluran pembuangan) di Denpasar, Kuta, dan Sanur di Provinsi Bali serta mengembangkan sistem pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi layanan fasilitas pembuangan oleh pemerintah daerah.

Sampai dengan Triwulan II TA 2012, sebagian besar kegiatan pada pinjaman IP-550 sudah selesai. Sisa pekerjaan adalah menyelesaikan pekerjaan pembangunan *urgent works sewerage* yang direncanakan akan selesai seluruhnya pada tahun 2014.

Tabel 11. Pencapaian Indikator Kinerja Output Loan IP-550 Denpasar Sewerage Development Project II

Masa Laku : 25/07/2008 – 25/07/2016

No.	Indikator Kinerja Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW II	%
1	Terpasangnya pipa saluran pembuangan (<i>sewer pipe</i>)	79.681	meter	2.390	2.390	100
2	Terbangunannya fasilitas pengolahan air limbah (<i>waste water treatment plant</i>)	1	unit	Target sudah tercapai 100% pada tahun 2011		
3	Terbangunnya jaringan drainase	1.589	meter	Target sudah tercapai 100% pada tahun 2011		
4	Terlaksananya pekerjaan <i>urgent works sewer</i>	18.500	meter	9.250	3.563	38,5

3.2. Progres Varian

Salah satu indikator cepat yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja pelaksanaan proyek adalah progres varian. Angka progres varian yang semakin kecil dari minus 30 mengindikasikan proyek tersebut bermasalah. Realisasi pencapaian target fisik tertinggal jauh dari waktu yang telah dipakai. Proyek dengan *progres varian* kurang dari atau sama dengan minus 30 ($PV \leq -30$) dikategorikan sebagai proyek yang mengalami keterlambatan serius.

Progres Varian adalah angka yang didapat dari selisih antara persentase penarikan kumulatif dengan persentase waktu pemakaian pinjaman sejak pinjaman tersebut efektif

Pada Triwulan II TA 2012 terdapat 52 proyek dengan $PV \leq -30$. Daftar pinjaman proyek dengan progres varian ≤ -30 dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Pinjaman Proyek Dengan Progres Varian ≤ -30

No	Instansi Penanggung Jawab>Nama Proyek	Kreditur	Progres Varian
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
1	7669-ID Dam Operational Improvement and Safety Project	World Bank	-45,5
2	2500-INO Integrated Citarum WRMP	ADB	-56,7
3	2501-INO Integrated Citarum WRMP	ADB	-30,9
4	2654-INO Metropolitan Sanitation and Health	ADB	-36,6
5	IP-523 Komerling Irrigation Project Stage Phase II	JICA	-35,8
6	IP-529 Tanjung Priok Acces Road Construction Project I	JICA	-62,4
7	IP-531 Tanjung Priok Acces Road Construction Project II	JICA	-65,6
8	IP-551 Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities	JICA	-36,2
9	IP-552 Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir	JICA	-42,8
10	IP-558 Regional Solid Waste Management for Mamminasata	JICA	-46,5
11	AIPRD-L-002 Eastern Indonesia National Road Improvement	Australia	-34,7

No	Instansi Penanggung Jawab>Nama Proyek		Kreditur	Progres Varian
12	EDCF INA-11	Manado By-Pass Project Phase II	Korea	-76,7
13	IND-0147	PNPM-Integrated Comm. Driven Dev't II	IDB	-33,8
14	IND-0149	PNPM-Integrated Comm. Driven Dev't II	IDB	-33,8
15	IND-0150	PNPM-Integrated Comm. Driven Dev't II	IDB	-33,8
KEMENTERIAN PERTANIAN				
16	IND-0125	The Post Tsunami Rehab of Agric. Infra. In NAD	IDB	-48,4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
17	IND-115	The North Sumatera University Hospital	IDB	-88,0
18	IND-129	Development an Upgrading of The State University of Jakarta	IDB	-86,0
19	IND-130	Development an Upgrading of The State University of Jakarta	IDB	-41,2
20	IND-137	The Dev't of Medical Education & Research Center	IDB	-32,7
21	IND-138	The Dev't of Medical Education & Research Center	IDB	-32,8
KEMENTERIAN KEUANGAN				
22	4762-IND	Government Financial Management and Revenue Adm. Project	World Bank	-39,5
23	7631-ID	Project for Indonesian Tax Administration Reform.	World Bank	-44,5
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
24	IP-521	The Urgent Rehab.Project of Tj. Priok	JICA	-64,1
25	IP-508	Railway Electrification and DD Tracking Project 1	JICA	-95,7
26	IP-540	Railway DT on Java South Line III	JICA	-52,9
27	IP-548	Double Track Cirebon-Kroya Phase I & III	JICA	-45,7
28	IND-133	Development of Belawan Port Phase I	IDB	-52,5
29	ID 00264	Procurement of 30 Unit Airport Rescue and Fire Fighting	Belanda	-59,7
30	21649501	Procurement of Track Materials 1000 km and Track Maintenance	China	-46,1
31	2005 66 612	Track Maintenance Improvement Programme	Jerman	-53,6
KEMENTERIAN KESEHATAN				
32	2164-INO (SF)	Comm. Water Services & Health Project	ADB	-35,8
33	INA-14	Improvement Of H Adam Malik in Medan	Korea	-53,8
34	INA-15	Upgrading of Prof. Dr. Kandaou Hospital in Manado	Korea	-71,3
KEMENTERIAN KOMINFO				
35	IP-542	ICT Utilization Project for Educational Quality Enh.	JICA	-34,1
KEMENTERIAN AGAMA				
36	IND-0113	The Reconstruction of IAIN Ar Raniry	IDB	-98,0
37	IND-0126	Upgrading & Dev of The SIU of S. Gunung Djati	IDB	-85,1
38	IND-0127	Upgrading & Dev of The SIU of S. Gunung Djati	IDB	-87,5
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
39	IND-0121	Dev't of Belawan and Sibolga Fishing Port	IDB	-56,2
BAPPENAS				
40	2264-INO (SF)	Infrastructure Reform Sector Dev. Project	ADB	-65,0
PT. PLN				
41	7905-ID	ERP Sumatera and Sulawesi	World bank	-34,7
42	2619-INO	Java-Bali Electricity Distribution Performance Imp. Project	ADB	-33,6
43	IP-516	Semarang PP Rehab & Gasfication	JICA	-89,6
44	IP-527	Keramasan Power Plant Extension Project	JICA	-47,4

No	Instansi Penanggung Jawab>Nama Proyek		Kreditur	Progres Varian
45	IP-532	Asahan Hydroelectric Power Plant Construction III	JICA	-43,1
46	IP-537	PLN Operation Improvement System for Supporting Generation Facilities	JICA	-34,0
47	IP-539	North-West Sumatera Interconnection Transmission	JICA	-41,6
48	CID101901F	Java-Bali Electricity Distribution Performance Imp. Project	Perancis	-33,6
49	JBIC CLA-2	Rehabilitation PLTU Suralaya Steam Power Plant	FKE	-39,0
50	JBIC CLA-4	Rehabilitation & Modernization of Paiton SPP 1	FKE	-31,7
	PT. SMI			
51	7731-ID	Indonesia Infrasructure Finance Facility	World Bank	-44,3
52	2516-ID	Indonesia Infrasructure Finance Facility	ADB	-44,3

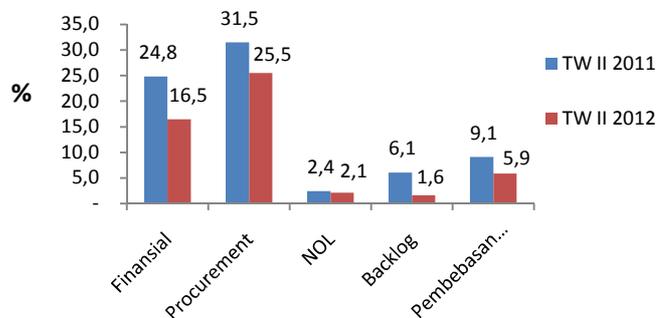
3.3. Status dan Permasalahan Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri

3.3.1. Isu Umum

Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman proyek luar negeri Triwulan II TA 2012 yang memiliki pengaruh signifikan atas pelaksanaan proyek dapat dikategorikan sebagai berikut: masalah finansial, masalah *procurement* (pengadaan barang/jasa), masalah penerbitan NOL, masalah backlog, dan masalah pembebasan lahan.

Berdasarkan pemantauan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri sampai dengan Triwulan II TA 2012 diperoleh persentase permasalahan proyek pinjaman luar negeri. Persentase permasalahan tertinggi ditempati oleh pengadaan barang/jasa sebesar 22,5% diikuti dengan masalah finansial dan pembebasan lahan. Permasalahan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa, antara lain: keterlambatan tender, sehingga mengharuskan diadakannya tender ulang. Namun demikian, permasalahan pengadaan barang/jasa telah mengalami penurunan bila dibandingkan periode yang sama pada TA 2011 yaitu sebesar 31,5%.

Gambar 10. Perbandingan Persentase Permasalahan Triwulan II TA 2011 dan TA 2012



Secara umum seluruh kategori permasalahan telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2011. Hal tersebut perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pinjaman luar negeri. Terkait dengan permasalahan pembebasan lahan, adanya UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat memberikan dampak positif pada permasalahan pembebasan lahan.

3.3.2. Isu Spesifik

Pada Triwulan II TA 2012 terdapat beberapa isu spesifik dalam pelaksanaan pinjaman proyek luar negeri, antara lain:

- Permasalahan pencantuman alokasi DIPA Tahun Anggaran 2013. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian dana pinjaman pada tahun 2013 bagi pinjaman proyek yang mengalami perpanjangan masa laku pinjaman, seperti yang dialami oleh proyek Kementerian Kesehatan, *Decentralized Health Service II (2074/2075-INO)* dan *The North Sumatera University Hospital (IND-0115)*, pinjaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua proyek ini akan berakhir masa lakunya pada tahun 2012, sehingga pada Tahun Anggaran 2013, tidak dialokasikan dana pinjaman luar negeri untuk pelaksanaan kegiatannya. Seiring dengan perkembangan pelaksanaan, kedua proyek pinjaman ini memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan tahun depan. Selain usulan perpanjangan itu sendiri, masalah ketersediaan dana pada tahun 2013 juga menjadi perhatian utama. Sementara itu proses pembahasan anggaran tahun 2013 telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu agar dana bisa dialokasikan, Menteri terkait perlu mengusulkan penambahan anggaran tahun 2013 untuk bisa diproses sehingga bisa dimasukkan ke dalam pagu terakhir 2013 meskipun proyek ini tidak diikutsertakan dalam pembahasan pada trilateral meeting antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait.
- Pada proyek JBIC CLA-4 *Rehabilitation and Modernization of PLTU Paiton 2-4* terdapat keterlambatan beberapa pekerjaan akibat mundurnya *outage schedule* untuk unit 1 dan unit 2. Selain itu terdapat beberapa alat/sparepart yang mengalami kerusakan di luar lingkup pekerjaan rehabilitasi. Hal ini mengakibatkan proyek diperkirakan akan selesai pada akhir November 2012, sehingga *taking over certificate (TOC)* akan terbit Desember 2012, dengan asumsi proses penyelesaian administrasi penarikan dana di Kementerian Keuangan membutuhkan waktu hingga pertengahan Desember 2012. Mengingat DIPA TA 2012 masih dibintang, maka sisa dananya akan diluncurkan pada TA 2013 menjadi DIPA-Luncuran. Dengan demikian tagihan yang timbul pada akhir tahun 2012 baru dapat diproses bulan Februari atau Maret tahun 2013. Dengan demikian proyek JBIC CLA-4 *Rehabilitation & Modernization of PLTU Paiton 2-4*

mengajukan usulan perpanjangan batas waktu penarikan sampai dengan tanggal 30 September 2013.

- Pada proyek 4786-IND *Urban Sector Development* perlu dilakukan negosiasi dengan para pedagang dalam proses penentuan tarif sewa. Dengan percepatan proses penentuan tarif, pasar dapat segera dioperasikan dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh pedagang. Selain itu perlu adanya percepatan proses pendaftaran calon pedagang. Calon pedagang yang menjadi prioritas adalah pedagang lama yang menempati pasar sebelum direhabilitasi maupun dibangun.
- Pada pelaksanaan proyek-proyek yang menggunakan skema SLA, yaitu untuk proyek-proyek lingkup PT. PLN, PT. Pertamina, PT. SMI dan PT. PGN, dokumen DIPA TA 2012 belum terbit. Berlarutnya penerbitan DIPA-SLA menjadi isu utama untuk proyek-proyek dalam kategori SLA. Lamanya durasi penerbitan SLA dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Tanggal Penerbitan DIPA-SLA

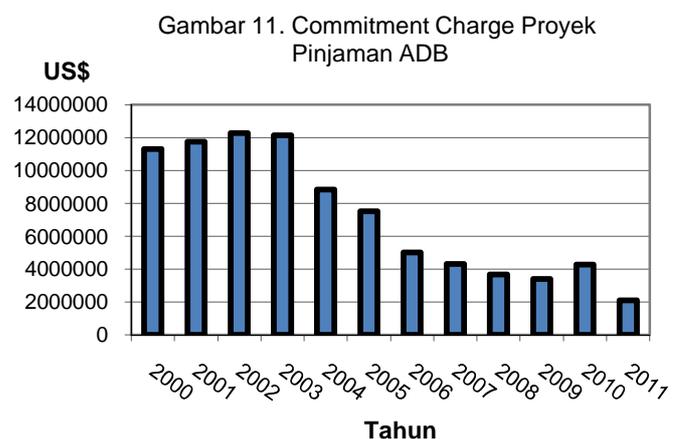
Tahun DIPA	Tanggal Terbit	No DIPA SLA
DIPA 2009	18 Agustus 2009	No. 0445.6/999-04.11-/2009
DIPA 2010	11 Oktober 2010	No. 0280/999-04.1-/2010
DIPA 2011	28 September 2011	No. 0011/999-04.1.12/00/2011

3.3.3. Tinjauan Portofolio

Dalam upaya peningkatan kinerja pelaksanaan proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri, Bappenas dan *Development Partner* telah melaksanakan *joint monitoring* yaitu melalui kegiatan *Country Portfolio Review Mission (CPRM) ADB*, *Country Performance Portfolio Review* Bank Dunia, dan *IDB Procurement Workshop and Clinic*.

3.3.3.1. Country Portfolio Review Mission (CPRM) ADB

CPRM (*Country Portfolio Review Mission*) ADB 2012 adalah sarana untuk mereview kinerja pelaksanaan seluruh proyek pinjaman yang didanai oleh ADB, termasuk membuat *action plan* terkait isu-isu yang menghambat pelaksanaan proyek.



Pada CPRM ADB 2012 ini terdapat 3 isu utama, yaitu: *Start up delay*, *Financial management* dan *Advance Procurement Action*. *Start-up delay* masih menjadi isu sistemik, pada tahun 2011 tercatat 13 dari 23 proyek pinjaman membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun sejak *approval* sampai efektif. Pada tahun 2010 rata-rata waktu yang dibutuhkan proyek sejak *approval* sampai efektif adalah 9,4 bulan, namun pada tahun 2011 rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 10,6 bulan. Lambatnya penyerapan suatu proyek akan berakibat pada tingginya *commitment fee* yang harus dibayarkan, tercatat sejak tahun 2000-2011 Pemerintah Indonesia telah membayar *commitment fee* sebesar USD 86,6 juta. Besaran *commitment fee* yang telah dibayarkan sejak tahun 2000-2011 dapat dilihat pada Gambar 11.

Selain isu-isu tersebut, terdapat beberapa isu yang diangkat Bappenas yaitu: (i) Rekonsiliasi data; (ii) Dasar penentuan target penyerapan; (iii) Kontrak kinerja; dan (iv) Peran CPRM untuk menjadi *lesson learned* terhadap *pipeline project* (CPS).

Tindak lanjut terkait dengan isu-isu di atas adalah sebagai berikut.

- a. Koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian/Lembaga dan Bappenas (Direktorat Sektor, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, dan Direktorat Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan) untuk meningkatkan persyaratan kesiapan proyek.
- b. Mekanisme pemantauan proyek *pipeline* dapat dibentuk untuk memperkuat *start-up* proyek.
- c. Dalam hal menyelaraskan angka proyeksi, dua set angka akan disajikan berdampingan dalam status bulanan, yaitu DIPA dan angka proyeksi ADB. ADB bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan terhadap angka proyeksinya, sementara Bappenas bertanggung jawab terkait dengan DIPA yang disetujui selama masa laku proyek dan memastikan bahwa DIPA tersebut juga terinformasikan kepada pihak ADB.
- d. Peningkatan kapasitas panitia pengadaan serta mendorong penggunaan *e-procurement*.
- e. *Desain monitoring Framework* (DMF) harus menjadi aspek kunci untuk indikator kinerja, serta penyelesaian masalah teknis harus selalu dihubungkan dengan output yang tercantum dalam framework.

3.3.3.2. Country Performance Portfolio Review (CPR) Bank Dunia

Tujuan pelaksanaan *Country Performance Portfolio Review* (CPR) adalah untuk mengevaluasi kinerja dan membahas upaya bersama dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri yang bersumber dari Bank Dunia. Selain sebagai evaluasi pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, CPR juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja *on going projects*. Lebih lanjut, hasil CPR akan digunakan sebagai masukan untuk penyusunan *Interim Country Partnership Strategy* (CPS).

Pembahasan CPPR dilakukan dalam 2 Working Grup dengan isu yang berbeda. Pada Working Grup 1 pembahasan meliputi *quality of project implementation* dan *quality of entry*. Terkait topik utama tersebut, beberapa isu yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

a. **Sustainability proyek**

Exit strategy diusulkan untuk masuk sebagai bagian dari pemenuhan kriteria kesiapan proyek. Sementara untuk mengurangi dampak keterlambatan akibat pergantian personil, perlu adanya pendampingan dalam bentuk kaderisasi terhadap personil baru.

b. **Kontrak kinerja**

Perlu sinkronisasi indikator kinerja antara Pemerintah dan Bank Dunia mulai dari tahap persiapan (pemenuhan kriteria kesiapan), *loan agreement*, kontrak kinerja, serta pemantauan dan evaluasi pencapaian kontrak kinerja. Selain itu juga diperlukan *early warning system* sebagai basis percepatan proyek-proyek bermasalah dan penyederhanaan mekanisme pelaporan.

c. **Proses Pengadaan Barang dan Jasa**

Saat ini telah terdapat dasar hukum serta surat edaran kepada semua Kementerian/Lembaga yang menyatakan bahwa *advance procurement* dapat dilakukan. Pembelajaran mengenai pelaksanaan *advance procurement* dapat dilakukan melalui *sharing session* atau *PMU workshop*.

d. **No Objection Letter (NOL)**

Beberapa penyebab lamanya proses penerbitan NOL antara lain lemahnya kapasitas panitia pengadaan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dan persyaratan tambahan yang tidak diketahui oleh panitia pengadaan. Solusi yang teridentifikasi adalah dibatasinya frekuensi korespondensi, peningkatan kapasitas panitia pengadaan dengan pelatihan, dan standarisasi dokumen pengadaan yang perlu disampaikan pada saat permintaan NOL.

e. **Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)**

Untuk mencegah keterlambatan proyek akibat lamanya pelaksanaan LARAP, maka diusulkan agar seluruh izin terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali telah diselesaikan sebelum proses negosiasi.

Topik pembahasan pada Working Grup 2 adalah *financial management* dan *procurement*. Terkait *financial management*, terdapat beberapa isu yang dibahas, yaitu:

a. **Rekonsiliasi Data**

- Pemerintah Indonesia wajib melaporkan pinjaman dan hibah. Pelaporan pinjaman dan hibah tidak perlu merubah peraturan di Bank, namun Bank sebaiknya dapat menyesuaikan dengan aturan Pemerintah Indonesia.
- Data *disbursement* belum tentu merupakan penyerapan dalam 1 tahun, tetapi juga pengeluaran dari tahun-tahun sebelumnya dan bersifat administratif.

- Disimpulkan bahwa penilaian kinerja tidak tepat jika menggunakan data *disbursement* dari Bank Dunia, data yang digunakan sebaiknya adalah data realisasi belanja.
- b. **Fund Channelling terkait Penerusan Pinjaman dan Penerusan Hibah**
 - Diperlukan kejelasan mekanisme proses penerusan pinjaman terkait dengan peraturan di Kementerian Keuangan dan persetujuan DPR.
 - Untuk penerusan hibah ke daerah, Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) seringkali bermasalah dengan lamanya proses penandatanganan NPPH dan penyerapan yang rendah.
 - Pengawasan NPPH perlu diperkuat agar penerusan hibah lebih optimal.
 - Pada level kementerian teknis, penerusan pendanaan luar negeri ke daerah sering kali menjadi masalah.
- c. **Lemahnya Payment Verification**

Validasi sering kali bersifat normatif karena *deadline* waktu pembayaran dan pertanggungjawaban. Penyimpangan dalam hal *payment verification* baru diketahui oleh BPK jika ada permasalahan fisik. Oleh karena itu, diperlukan petugas pengontrol dan ketelitian pencatatan kelengkapan dokumen.
- d. **Soft Expenditure**

Isu penyimpangan *soft expenditure* terjadi di pinjaman Bank Dunia dan juga kegiatan yang dibiayai rupiah murni. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan terkait *soft expenditure* dari pengawas internal untuk mengawal pelaksanaan, bukan hanya melaksanakan audit di akhir pelaksanaan kegiatan.
- e. **Dana bergulir/Revolving Fund**

Mekanisme dana bergulir di beberapa proyek pinjaman Bank Dunia seperti PNPM seringkali menjadi temuan karena dana yang dikelola di masyarakat tersebut habis. Seharusnya mekanisme dana bergulir memiliki sistem dan monitoring yang kuat.
- f. **Budget Delay**

Meskipun DIPA terlambat, seharusnya tidak menggagalkan inisiasi pelelangan. Di Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa sudah jelas disebutkan bahwa pelelangan dapat dilakukan sebelum DIPA terbit. Tetapi kontrak memang belum dapat ditandatangani jika DIPA belum direvisi.

Sedangkan terkait Pengadaan Barang dan Jasa, isu yang menjadi pembahasan adalah:

- a. **Kapasitas panitia pengadaan**

Pergantian panitia pengadaan selalu menjadi isu terkait *dedicated procurement expert*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas panitia pengadaan dari LKPP berupa Unit Layanan Pengadaan (ULP).

b. **Procurement Plan**

Procurement harus dipersiapkan dari tahap perencanaan dikarenakan berkaitan dengan rencana *disbursement* untuk menentukan pemaketan dan rencana pendanaan di tingkat pelaksana.

c. **Advance Procurement**

Advance procurement telah diatur dalam Perpres 54/2010. Namun, proses pengadaan tersebut seringkali tertunda karena pelaksana kegiatan menunggu DIPA dan DPA. Untuk mendorong proses *advance procurement*, diperlukan insentif bagi pelaksana proses tersebut.

d. **Peraturan Pengadaan yang Digunakan**

Proses pengadaan akan menggunakan Perpres 54/2010 atau *World Bank Procurement Guidelines*? Meskipun pada proyek-proyek pinjaman Bank Dunia sebelumnya disepakati penggunaan Perpres 54/2010 dengan 9 *safeguards* untuk metode *National Competitive Bidding* (NCB) dan *World Bank guidelines* untuk metode *International Competitive Bidding* (ICB), saat ini sedang dipersiapkan penggunaan *Standard Bidding Document* (SBD) dari LKPP dengan beberapa modifikasi untuk digunakan pada pengadaan *goods and works* dengan metode NCB.

e. **E-Procurement**

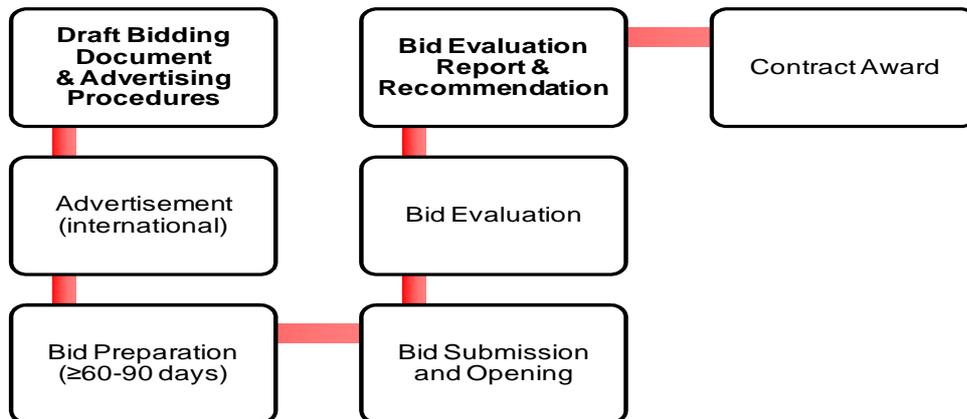
Bank Dunia sedang melakukan review penggunaan sistem *e-procurement* dan masih terdapat gap dalam sistem yang belum dapat diterima oleh Bank Dunia.

3.3.3.3. IDB Procurement Workshop and Clinic

Islamic Development Bank (IDB) *Procurement Workshop* dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang sama antara IDB dengan pelaksana proyek terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemahaman terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Indonesia berdasarkan *guidelines* IDB. Pemahaman tersebut dibutuhkan karena berdasarkan identifikasi sampai dengan triwulan ini, keterlambatan dalam pelaksanaan pinjaman luar negeri paling banyak disebabkan oleh proses pengadaan barang dan jasa.

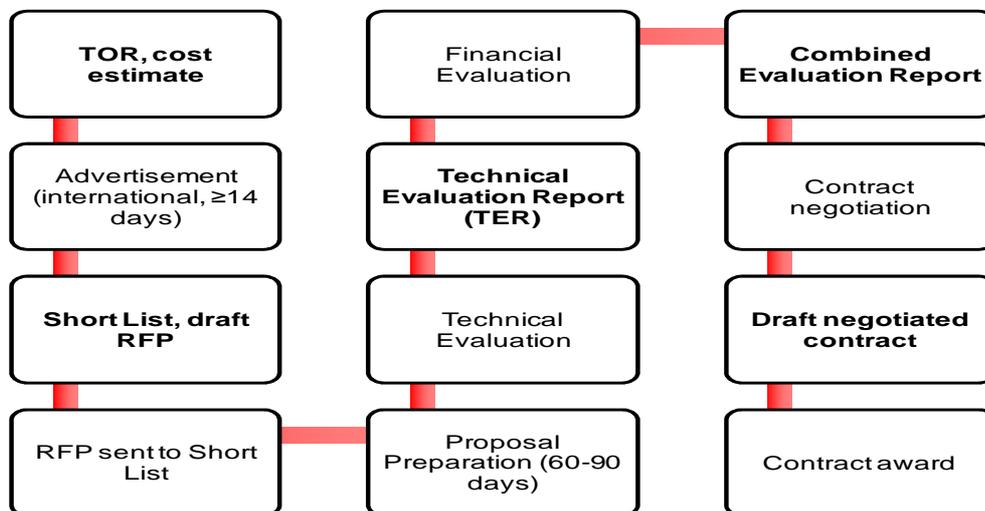
Proses pengadaan di IDB menggunakan 2 *guidelines* yaitu *Guidelines for Procurement of Goods* dan *Guidelines for The Use of Consultant*. Untuk pengadaan *goods, works and services* proses pengadaan dilaksanakan melalui 7 tahapan, mulai dari draft bidding sampai dengan penandatanganan kontrak. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan 2 NOL (*no objection letter*) dari IDB yaitu pada proses *draft bidding document* dan *advertising procedure*. Jangka waktu pengadaannya berlangsung kurang lebih 3-4 bulan.

Gambar 12. Proses Pengadaan Goods, Works and Services Berdasarkan IDB Guidelines.



Untuk pengadaan konsultan proses pengadaan dilaksanakan melalui 12 tahapan, mulai dari pembuatan TOR (*cost estimate*) sampai dengan penandatanganan kontrak. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan 5 NOL (*no objection letter*) dari IDB yaitu pada proses TOR (*cost estimate*), shortlist/RFP (*request for proposal*), TER (*technical evaluation report*), *evaluation report* dan draft kontrak. Jangka waktu pengadaannya berlangsung kurang lebih 4-6 bulan.

Gambar 13. Proses Pengadaan Konsultan Berdasarkan IDB Guidelines



Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang sering menghambat pengadaan barang/jasa, diantaranya kualitas dan kelengkapan dokumen, kepatuhan dalam melaksanakan langkah-langkah atau prosedur pengadaan, kualitas dari konsultan pada proses *short-listing*, proses evaluasi yang kurang baik, adanya calon pemenang (*bidders*) yang didiskualifikasi, kualitas hasil evaluasi teknis (metode skoring) serta adanya komplain/protes dari *bidders* maupun kurangnya calon

peserta. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan penerbitan NOL dari IDB menjadi terlambat sehingga penandatanganan kontrak pun tertunda.

Knowledge sharing terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa ini perlu terus dilaksanakan. Sehingga ke depannya diharapkan pelaksanaan workshop maupun konsultasi secara langsung dengan pihak *development partner* dapat terus diselenggarakan. Harapannya adalah agar proses pengadaan dapat berlangsung dengan cepat dan pelaksanaan proyek pinjaman pun dapat selesai tepat waktu.

BAB IV

Pemantauan Lapangan

Pada Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN edisi Triwulan II TA 2012 ini disajikan beberapa laporan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri yang diperoleh dari pemantauan lapangan, yaitu: Pinjaman ADB 1982-INO *Renewable Energy Development: PLTA Genyem*, Pinjaman Bank Dunia 4786-IND *Urban Sector Development Reform*, Pinjaman Bank Dunia 4205-IND *Early Childhood Education and Development*, dan Pinjaman JICA IP-541 *Hasanuddin University Development*.

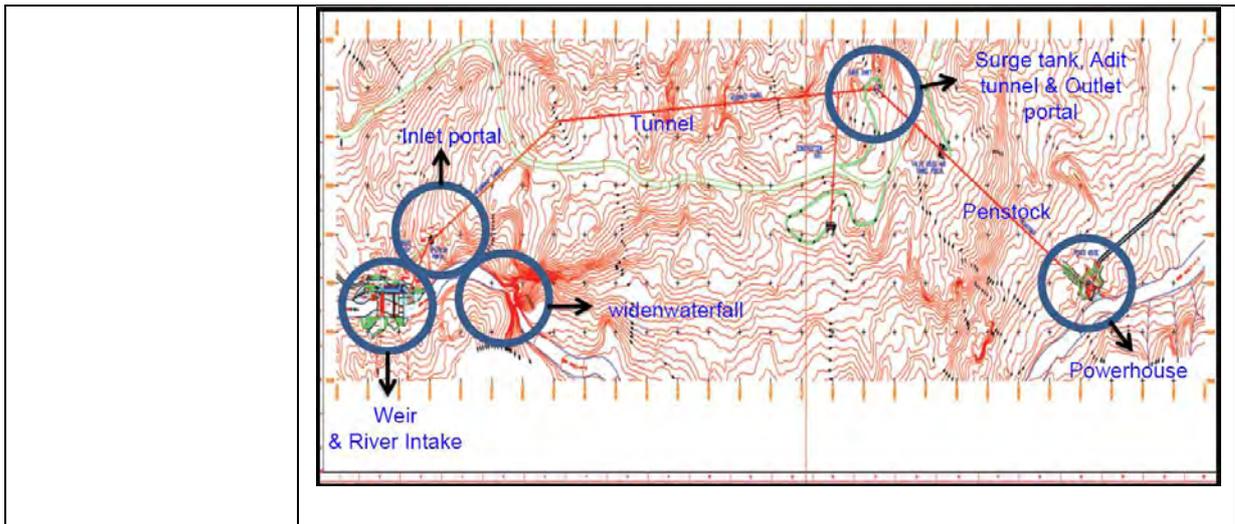
4.1. Pinjaman ADB 1982-INO *Renewable Energy Development: PLTA Genyem*

Informasi Ringkas

PLTA Genyem merupakan salah satu paket dari 7 pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari pinjaman ADB 1982-INO *Renewable Energi Development*. PLTA Genyem berada di kawasan hutan lindung yang cukup terisolir di Genyem, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pengelola	PT. PLN Unit Pelaksana Konstruksi Pembangkit SULMAPA I
Sumber pembiayaan	1. Loan ADB: USD 10,76 juta dan Rp 195 Milyar 2. APLN: Rp 15,19 Milyar
Kapasitas	2 x 10 MW
Luas Area	149,107 Ha
Lingkup pekerjaan	Weir, River Intake, Waterfall, De-sedimentation + headrace, Headrace Culvert, Tunnel construction, Outlet portal, Surge tank, penstock, Power House, Miscellaneous
Lokasi	Ds. Sentosa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Propinsi Papua





Kinerja Pelaksanaan

Kemajuan pembangunan PLTA Genyem mencapai 53%, sedangkan pekerjaan konstruksi baru mencapai 39% dari bobot seluruh pekerjaan. Efektif kontrak akan berakhir pada bulan Agustus 2012. Dengan demikian untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan maka dibutuhkan perpanjangan masa laku kontrak.

Beberapa kegiatan ditemui mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan. Contohnya pada pembangunan *tunnel* sepanjang 1,6 km, realisasi sampai dengan bulan Mei 2012 baru mencapai 629 m. Pada saat ini pembangunan *tunnel* merupakan pekerjaan kritis. Rencana penyelesaian adalah pada bulan Desember 2012, namun dengan kondisi seperti saat ini terdapat perkiraan bahwa seluruh pekerjaan *tunnel* baru selesai pada tahun 2013.

Pekerjaan lain seperti *weir*, *headrace culvert*, *surge tank*, *penstock* dan *power house* sedang berjalan dan diupayakan untuk dipercepat penyelesaiannya. Untuk peralatan *mechanical-electrical*, proses *manufacturing* telah selesai dan sebagian telah dikirim ke lokasi proyek. Proses instalasi seluruh peralatan M-E menunggu penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Hambatan pelaksanaan pekerjaan juga disebabkan belum terbitnya dokumen DIPA-SLA 2012. DIPA Luncuran TA 2011 yang digunakan untuk pembiayaan proyek sampai dengan saat ini dananya semakin menipis terutama untuk pembiayaan dengan metode Pembayaran Langsung (PL).

Rencana Tindak

Mengingat masa laku *loan* akan berakhir pada September 2013 maka diperlukan upaya-upaya yang telah direkomendasikan selama kunjungan sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan maka Manager UPK KIT SULMAPA I perlu segera melakukan antisipasi untuk memperpanjang masa kontrak.
2. PMO di kantor pusat perlu mengupayakan revisi DIPA SLA Luncuran untuk menambah porsi dana yang pembayarannya menggunakan metode PL. Hal ini

untuk menampung tagihan pembayaran dari pihak kontraktor mengingat DIPA SLA TA 2012 belum terbit.

3. Pihak kontraktor harus didorong terus untuk mengejar keterlambatan pekerjaan, terutama pembangunan *tunnel*, agar keseluruhan pekerjaan dapat diselesaikan sebelum masa laku *loan* berakhir.
4. Pelaksana UPK KIT SULMAPA I juga perlu segera mensinkronkan pekerjaan konstruksi pembangkit dengan pembangunan jaringan transmisi yang pembiayaannya bersumber dari dana APLN.

4.2. Pinjaman Bank Dunia 4786-IND *Urban Sector Development Reform*

Informasi Ringkas

Kota Parepare, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 3 dari 10 daerah yang menjadi sasaran pelaksanaan pinjaman Bank Dunia 4786-IND/7760-ID: *Urban Sector Development Reform*. Di ketiga daerah tersebut terdapat 7 paket kegiatan konstruksi berupa pembangunan pasar. Ketujuh pasar tersebut adalah Pasar Lakessi Kota Parepare, Pasar Rappang, Pasar Pangkajene dan Pasar Tanru Tedong di Kabupaten Sidrap serta Pasar Pekkae, Pasar Mongkoso dan Pasar Palanro di Kabupaten Barru. Dalam pelaksanaannya, pendanaan paket kegiatan konstruksi di 3 daerah tersebut tidak hanya menggunakan dana pinjaman luar negeri saja, akan tetapi pemerintah daerah pun turut berkontribusi.

Tabel 14. Kinerja Pelaksanaan Proyek 4786-IND *Urban Sector Development*

No.	Kota/ Kabupaten	Paket Pekerjaan	Pembiayaan (Rp Juta)		Progres Fisik
			Porsi Pinjaman Luar Negeri	Porsi APBD	
1.	Kota Parepare	Pasar Lakessi	41.151,0	25.592,0	100 %
2.	Kab. Sidrap	Pasar Rappang	13.858,0	-	100 %
		Pasar Pangkajene	13.370,0	-	100 %
		Pasar Tanru Tedong	9.379,0	5.000,0	100 %
		Pasar Pekkae	23.212,0	1.376,0	100 %
3.	Kab. Barru	Pasar Mongkoso	9.613,0	-	100 %
		Pasar Palanro	12.971,0	-	100 %

Kinerja Pelaksanaan

Pembangunan fisik/konstruksi pada ketujuh pasar di 3 kabupaten/kota tersebut sudah selesai seluruhnya, akan tetapi belum seluruh pasar sudah dioperasikan. Ada pasar yang saat ini masih dalam tahap pendaftaran pedagang dan ada pula yang sudah dioperasikan.

1. Kota Parepare

Pembangunan fisik konstruksi di Pasar Lakessi sudah selesai seluruhnya pada Oktober 2010 dan menurut rencana awal proses pemindahan pedagang

seharusnya sudah dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2011. Penetapan tarif sewa dan juga penentuan jumlah pedagang yang menjadi prioritas untuk menempati pasar tersebut menjadi hambatan dalam proses pemindahan pedagang, sehingga hal ini menyebabkan terdapat beberapa bagian pasar ada yang mengalami kerusakan. Perkembangan sampai saat ini tarif sewa sudah dibahas antara pedagang, pemerintah daerah dan pihak DPRD. Proses penempatan pedagang saat ini dalam tahap pendaftaran. Pedagang yang menjadi prioritas adalah daftar pedagang di tahun 2008 atau daftar pedagang sebelum proses pembangunan dimulai. Sebagai pengelola pasar, pemerintah daerah akan membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Khusus yang tidak hanya menangani pasar saja, tetapi juga menyangkut keamanan, kebersihan dan parkir. Pengelolaan pasar menjadi penting karena terkait dengan proses *operation* dan *maintenance* (O&M) sehingga pemanfaatan pasar dapat berkelanjutan.

2. Kabupaten Sidrap

Pembangunan fisik konstruksi 3 pasar di Kabupaten Sidrap, yaitu Pasar Rappang, Pasar Tanru Teddong dan Pasar Pangkajene sudah selesai seluruhnya dan sudah dioperasikan. Dalam pengoperasiannya terdapat penempatan pedagang kurang tertata dengan baik dan tidak ditempatkan berdasarkan jenis dagangan sehingga terkesan kumuh, jumlah pedagang sudah melebihi kapasitas pasar, serta pembuangan sampah dan sistem pengolahan air limbah pasar kurang dikelola dengan baik. Pengelolaan pasar saat ini dikelola oleh UPTD yang berada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan tidak hanya mengelola 3 pasar saja tetapi seluruh pasar yang ada di Kabupaten Sidrap.

3. Kabupaten Barru

Pembangunan fisik konstruksi 3 pasar di Kabupaten Barru, yaitu Pasar Pekkae, Pasar Mangkoso sudah selesai seluruhnya dan belum difungsikan. Pembangunan ketiga pasar tersebut selesai pada bulan Agustus 2011 dan sudah melaksanakan proses *final hand over* (FHO) dari kontraktor kepada PIU Kabupaten Barru pada bulan Desember 2011. Saat ini masih dalam proses penetapan tarif dan masih dibahas dengan calon pedagang yang akan menempati pasar tersebut, sehingga pasar belum difungsikan. Pedagang menginginkan agar status dari kios di pasar adalah hak milik. Pengelolaan pasar akan dilaksanakan oleh UPTD yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Rencana Tindak

Meskipun pembangunan fisik konstruksi pasar di 3 daerah tersebut sudah selesai, akan tetapi perlu adanya beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan proyek ini untuk menjamin keberlanjutannya, antara lain:

1. Melaksanakan proses negoisasi dengan para pedagang dalam proses penentuan tarif pasar. Proses negoisasi ini dapat dibantu oleh pihak DPRD dengan harapan dapat mempercepat kesepakatan. Dengan percepatan proses

penentuan tarif, pasar dapat segera dioperasikan dan manfaatnya dapat langsung dirasakan pedagang.

2. Untuk pasar yang belum dioperasikan dan terdapat beberapa kerusakan, pihak PIU dapat memanfaatkan masa perawatan yang masih berlaku untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.
3. Perlu adanya percepatan proses pendaftaran calon pedagang. Calon pedagang yang menjadi prioritas adalah pedagang lama yang menempati pasar sebelum direhabilitasi maupun dibangun. Untuk mempermudah proses penentuan calon pedagang, pemerintah daerah dapat menggunakan data di tahun dimana pasar tersebut mulai direhabilitasi atau dibangun. Setelah seluruh pedagang lama mendapatkan kios di pasar, kelebihan jumlah kios kemudian ditawarkan kepada pedagang baru yang ingin berdagang di pasar tersebut.

Pihak pemerintah daerah dapat mempertimbangkan beberapa opsi pembentukan institusi pengelola pasar. Pasar dapat dikelola melalui UPTD Khusus, pembentukan dinas pasar, badan usaha milik daerah (BUMD) atau dikerjasamakan dengan pihak swasta. Beberapa opsi tersebut dapat diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan pasar dapat terintegrasi mulai dari perawatannya, kebersihan, keamanan dan perparkirannya. Dengan semakin terintegrasinya sistem pengelolaan maka pasar dapat tertata dengan baik, jumlah pedagang tidak melebihi kapasitas dan sistem pembuangan sampah maupun pengelolaan airnya berjalan dengan baik.

4.3. Pinjaman Bank Dunia 4205-IND *Early Childhood Education and Development*

Informasi Ringkas

Early Childhood Education and Development (4205-IND) merupakan proyek pinjaman Bank Dunia dengan tujuan untuk meningkatkan proporsi anak dari keluarga miskin yang siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya melalui partisipasi dalam program pendidikan pengembangan anak usia dini yang mudah efektif dan berkualitas dan memperlancar perkembangan anak usia dini yang holistik yang disalurkan melalui mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Hal ini dilaksanakan melalui 3 komponen:

1. Meningkatkan pelayanan PPAUD terpadu kepada masyarakat miskin.
2. Melaksanakan pengembangan sistem yang berkesinambungan untuk PAUD yang berkualitas.
3. Melaksanakan manajemen, pemantauan dan evaluasi proyek yang efektif.

Pengelola	Dit Jen PAUD, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber pembiayaan	Loan Bank Dunia: USD 71,22 juta
Masa laku pinjaman	11 Desember 2006 – 31 Desember 2013
Kategori pekerjaan	1 Training, Workshop Operational exp under pt A of Project 2-A Block Grants

	2-B Matching Grants 3 Training, Workshop Operational exp under pt B of Project 4 Goods, Workshop Operational exp under pt C of Project 5 Unallocated
Sasaran	738.000 anak usia 0-6 tahun di 3000 desa miskin yang berada di 50 kabupaten yang tersebar di 21 Provinsi
Lokasi	NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tenggara, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat

Kinerja Pelaksanaan

Secara keseluruhan proyek yang telah memasuki tahun ketujuh masa pelaksanaan sejak tahun 2006 dan akan berakhir tahun 2013 memiliki progres yang cukup baik. Dari 9 indikator kinerja output yang ditargetkan, 6 indikator kinerja output sudah tercapai pada akhir tahun 2011, sehingga pada TA 2012 sampai dengan *closing date* hanya tersisa 3 indikator output yang harus diselesaikan, yaitu (1) Jumlah Anak Usia Dini (AUD) miskin yang terdaftar di layanan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), (2) Jumlah kabupaten yang telah mengeluarkan regulasi yang mendukung Program PAUD, dan (3) Jumlah desa yang melakukan pemantauan berbasis masyarakat.

Dari ketiga indikator output tersebut, pencapaian pada Triwulan II TA 2012 adalah: (1) Terdapat tambahan 147.806 pada indikator Jumlah AUD miskin terdaftar di layanan TPK sehingga sampai dengan Triwulan II TA 2012 telah tercapai 211.711 AUD miskin terdaftar di layanan TPK atau 115% dari target TA 2012 (184.722 anak). Secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II TA 2012 telah tercapai 571.591 AUD yang terdaftar atau 77% dari target total sebesar 738.888 AUD. Pencapaian ini telah melebihi target 75% yang hendak dicapai sampai dengan akhir TA 2012. (2) Jumlah kabupaten yang telah mengeluarkan regulasi dalam mendukung Program PAUD tidak bertambah pada Triwulan II TA 2012, sehingga pencapaian indikator ini masih dibawah target 2 kabupaten atau 25% target TA 2012 sebesar 8 kabupaten. Secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II TA 2012 telah tercapai 35 kabupaten atau 75% dari target total sebesar 50 kabupaten, dimana sampai dengan akhir TA 2012 ditargetkan mencapai 42-43 desa atau 87% dari target total. (3) Jumlah desa yang melakukan pemantauan berbasis masyarakat (tahunan) tidak bertambah pada Triwulan II TA 2012, sehingga pencapaian indikator ini masih dibawah target 360 desa atau 50% dari target TA 2012 (720 desa). Secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II TA 2012 telah tercapai 1.680 desa atau 56% dari target total sebesar 3.000 desa, dimana sampai dengan akhir TA 2012 ditargetkan mencapai 2.400 desa atau 85% dari target total.

Pada Triwulan II TA 2012 dilakukan peninjauan lokasi ke dua kabupaten, yaitu Kab. Sijunjung di Sumatera Barat dan Kab. Mamuju di Sulawesi Barat. Beberapa hal yang bisa diketahui dari peninjauan tersebut adalah:

1. Kab. Sijunjung, Sumatera Barat mempunyai target untuk melayani anak usia dini (AUD) sebanyak 14,760 dan dapat terlayani sebesar 9,157 (62%). Di kabupaten

- ini 1 (satu) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak terbentuk karena minimnya jumlah AUD di desa sasaran.
2. TPK di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 200 yang tersebar di 20 desa yang berada di 15 kecamatan dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 260 orang. Dengan jumlah target AUD yang sama untuk setiap kabupaten program PPAUD, Kab. Mamuju telah melayani 5.366 AUD (36%). Setiap TPK mendapat alokasi dana sebesar Rp 90 juta yang dibagikan dalam 3 tahap selama 3 tahun, yaitu sebesar Rp 36 juta, Rp 27 juta dan kemudian terakhir Rp 27 juta. Biaya ini digunakan untuk biaya rehabilitasi atau renovasi tempat layanan, untuk pembelian bahan habis pakai, biaya untuk perbaikan gizi dan pemberian makanan tambahan, operasional tenaga pendidik, administrasi TPK, alat permainan edukatif dalam dan luar ruangan, dan penyuluhan kepala keluarga miskin.
 3. Secara umum di 2 kabupaten tersebut:
 - Orang tua ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan berkontribusi memberikan sumbangan yang besarnya ditentukan melalui musyawarah bersama. Selain itu hibah yang berbentuk tanah maupun bangunan juga seringkali didapat dari masyarakat
 - Honor tenaga pendidik yang relatif kecil, sehingga membutuhkan komitmen dari daerah untuk membantu pelaksanaannya. Beberapa kepala daerah telah menyatakan kesediaannya untuk mengalokasikan dana untuk honor tenaga pendidik setelah proyek pinjaman ECED ini selesai.

Rencana Tindak

Diperlukan upaya-upaya yang telah direkomendasikan selama kunjungan sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dari pemerintah daerah untuk membantu biaya operasional TPK yang telah terbentuk, terutama honor tenaga pendidik agar setelah pinjaman ini berakhir, TPK masih bisa terus beroperasi.
2. Perlunya peninjauan ulang mengenai persamaan satuan harga/besarnya bantuan *blockgrant* kepada TPK di wilayah yang berbeda, karena adanya setiap wilayah mempunyai index harga yang berbeda.
3. Berkaitan dengan administrasi kegiatan, beberapa TPK masih memerlukan bimbingan dalam pelaporan kegiatan mingguan, bulanan, administrasi keuangan, karena keterbatasan tenaga pendidik. Kendala dan hambatan tersebut harus segera diatasi agar TPK dapat mandiri dan berkembang.

4.4. Pinjaman JICA IP-541 *Hasanuddin University Development*

Informasi Ringkas

Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (*Hasanuddin University Engineering Faculty Development*) bertujuan untuk mewujudkan perbaikan pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif dan penguatan kegiatan riset di bidang teknik melalui pengembangan Fakultas Teknik termasuk pendirian Pusat Teknologi

di Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan, yang selanjutnya akan berperan dalam peningkatan industri di Indonesia khususnya Indonesia Timur dengan menghasilkan sumber daya manusia dan penguatan kapasitas riset di bidang teknik.

Pengelola	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber pembiayaan	Loan JICA sebesar JPY 7.801 juta
Masa laku pinjaman	26 Juli 2007 – 26 Juli 2016
Kategori pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Construction, equipment, and furniture</i> 2. <i>Fellowship program</i> 3. <i>Consulting services for project management</i> 4. <i>Consulting service for fellowship and research program</i> 5. <i>Contingencies</i> 6. <i>Unavailable balance</i>
Lokasi	<p>Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan</p> 

Lingkup pekerjaan dalam proyek ini adalah :

1. *Construction of building* yaitu pekerjaan pembangunan gedung dan infrastruktur fakultas teknik.
2. *Equipment and furniture* yaitu pengadaan peralatan laboratorium dan furniture untuk fakultas teknik.
3. *Fellowship program* yaitu pekerjaan pelaksanaan program beasiswa pendidikan di dalam negeri dan luar negeri serta pelatihan.
4. *Consulting services for project management* adalah meliputi konsultan teknik dan konsultan manajemen proyek.
5. *Consulting service for fellowship* yaitu meliputi konsultan pelaksanaan program beasiswa di dalam maupun di luar negeri.

Kinerja Pelaksanaan

Permasalahan yang terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2012 adalah:

1. Kontrak Paket 1 berupa pembangunan gedung, peralatan dan perangkat mebel untuk fakultas teknik arsitektur dan teknik sipil, direncanakan akan diusulkan untuk diperpanjang guna finalisasi pekerjaan.
2. Kontrak Paket 2 berupa pembangunan gedung, peralatan dan perangkat mebel untuk fakultas teknik elektro dan teknik mesin, dalam proses *re-tender*, terdapat 4 perusahaan yang mengajukan penawaran. Ditargetkan Paket 2 dapat terkontrak pada tahun 2012, sehingga uang muka sebanyak 20% dari Rp 200 Milyar dapat ditarik pada tahun 2012.
3. Sesuai pernyataan kinerja bahwa sampai Triwulan II 2012 akan ditarik dana sebesar Rp 200 Milyar, sampai bulan Mei 2012 belum ada penarikan karena barang berupa *medical equipment* masih tertahan di bea cukai sehingga belum dilakukan pembayaran. Saat ini sedang meminta surat dari Kementerian Keuangan untuk dapat mengeluarkan barang/peralatan.
4. Kontrak Paket 3 berupa pembangunan gedung, peralatan dan perangkat mebel untuk teknik kelautan dan teknik geologi, sedang dalam pelaksanaan.
5. Kontrak Paket 4 berupa pembangunan gedung *workshop* dan rumah daya, dalam pelaksanaan walaupun agar terkendala pada kegiatan pembangunan tiang pancang karena adanya 'bungker' dari bangunan lama sehingga sedang diupayakan memindahkan lokasi tiang pancang.

Rencana Tindak

Sedangkan tindak lanjut permasalahan yang dilakukan adalah:

1. Percepatan pelaksanaan untuk paket-paket yang telah terkontrak agar dapat memenuhi targetnya.
2. Proses *re-tender* agar segera dilakukan sesuai target agar dapat terkontrak pada tahun 2012 dan dapat menarik muka sebanyak 20% dari Rp 200 Milyar pada tahun 2012.
3. Penanggung jawab proyek agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan surat yang dapat mengeluarkan barang/peralatan agar dapat dikirim dan segera dipasang.

BAB V

Kinerja Pelaksanaan Hibah Luar Negeri

5.1. Kinerja Pencapaian Output Hibah Luar Negeri

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 pasal 77, maka pada edisi Triwulan II TA 2012 ini mulai dilaporkan mengenai pelaksanaan proyek hibah yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada edisi Triwulan II TA 2012 ini diambil 7 proyek hibah yang terdiri atas proyek hibah USAID *Aceh Road Reconstruction*, proyek hibah Belanda *Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading* (BERMUTU), dan proyek hibah Bank Dunia *Extending Telecommunication in Rural Indonesia*, proyek hibah ADB *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR), proyek hibah Bank Dunia *Government Partnership Facility*, *CEC Corruption Prevention*, proyek hibah MDF dan Bank Dunia *IRFF-AF*, serta proyek hibah UNDP *Barrier Removal to The Cost Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling* (BRESL).

5.1.1. Hibah USAID Aceh Road Reconstruction

Informasi Ringkas

Gempa bumi dengan kekuatan 9,2 SR terjadi di 150 km lepas pantai barat Sumatera dan memicu serangkaian tsunami setinggi 30 meter yang menewaskan 230.000 dan menghancurkan infrastruktur masyarakat pesisir. Dalam rangka membantu merehabilitasi kerusakan-kerusakan tersebut, USAID menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian



Pekerjaan Umum untuk merancang, merehabilitasi, dan merekonstruksi jalan dari Banda Aceh ke Meulaboh dengan total dana hibah yang diberikan berjumlah USD 371,4 juta. Dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut USAID mengikat kontrak dengan Parsons untuk mempersiapkan desain dan mengelola pembangunannya.

Kinerja Pelaksanaan

Peresmian pemanfaatan jembatan Lambeuso dan Unga serta sebagian jalan telah dilaksanakan oleh Gubernur. Secara keseluruhan proyek telah dilaksanakan dengan baik, hal ini tampak dari kualitas output yang dihasilkan. Jalan yang dibangun memiliki kualitas di atas jalan nasional dimana rata-rata tiap kilomernya membutuhkan dana Rp 23 miliar sementara untuk standar jalan nasional, biasanya membutuhkan dana sekitar Rp 5-10 miliar/km. Manfaat yang dirasakan adalah efisiensi waktu, jika sebelumnya waktu tempuh kendaraan berkisar 6-7 jam, kini dengan selesainya jalan ini dapat ditempuh sekitar 3 jam.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, seperti longsor yang dapat membahayakan para pengguna jalan. Ancaman longsor ini sebenarnya sudah diantisipasi dengan membangun dinding pembatas antara tebing dengan jalan, namun hal ini kurang optimal dikarenakan dinding yang dibangun masih rendah (0,5 meter) sehingga runtuhannya masih masuk ke badan jalan.

Rencana Tindak

Untuk mengantisipasi bahaya longsor pada area-area tertentu akan dilakukan peninggian dinding pembatas antara tebing dan badan jalan, sehingga longsor dapat tertahan oleh dinding tersebut. Selain itu perlu penambahan rambu-rambu jalan untuk mengantisipasi area-area berbahaya khususnya pada bagian tikungan-tikungan tajam dan hewan ternak yang menyeberang jalan.

5.1.2. Hibah Belanda *Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU)*

Informasi Ringkas

Program ini pada dasarnya dilakukan atas tindak lanjut dari studi yang dilakukan oleh Ditjen PMPTK mengenai penempatan dan pengangkatan guru pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota (2005), dan Proyek Bermutu dilaksanakan melalui kerjasama dengan 5 (lima) Kabupaten terpilih yaitu Tanah Datar (Provinsi Sumatera Barat), Sukabumi (Provinsi Jawa Barat), Lombok Barat (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Gorontalo (Gorontalo), dan Merauke.

Tujuan proyek ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas secara menyeluruh kinerja guru.

Pengelola	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Latar Belakang	Studi penempatan dan pengangkatan guru terkait dengan: 1. Penyebaran guru yang tidak merata 2. Rasio guru dan murid yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain 3. Kualifikasi pendidikan guru yang cenderung masih rendah khususnya pada Sekolah Dasar 4. Ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan bidang

	<p>yang dikuasai</p> <p>5. Tunjangan atau insentif yang beragam sesuai dengan kemampuan dari kabupaten/kota yang bersangkutan</p> <p>Upaya-upaya untuk peningkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan 2. Peningkatan kompetensi 3. Penyelenggaraan uji sertifikasi bagi guru 4. Pemberdayaan kelompok-kelompok kerja guru, kepala sekolah dan pengawas (KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS) 5. Percepatan kualifikasi pendidikan minimal S1/D-4 dan guru yang telah disertifikasi
Sumber Dana	Pemerintah Belanda
Lingkup pekerjaan	Mereformasi pendidikan bagi calon guru, Memperkuat upaya peningkatan mutu guru pada tingkat kabupaten dan sekolah, Memperbaharui sistem akuntabilitas dan insentif untuk meningkatkan kinerja dan karir guru, dan Meningkatkan monitoring and evaluasi mutu guru dan prestasi belajar murid
Lokasi	<p>Pusat:</p> <p>Ditjen Pendidikan Tinggi (Direktorat PTK Dikti, UT), BPSDMPK dan PMP (Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan), Ditjen Pendidikan Dasar (Dit. PPTK Dikdas), Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Statistik Pendidikan), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Pusat Penilaian Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan Inovatif dan BAN-PT).</p> <p>Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan:</p> <p>LPMP Propinsi NAD (1 kota 2 kabupaten), LPMP Propinsi Jambi (1 kota 2 kabupaten), LPMP Propinsi Sumatera Barat (1 kota 5 kabupaten), LPMP Propinsi Jawa Barat (2 kota 9 kabupaten), LPMP Propinsi Jawa Tengah (10 kabupaten), LPMP Propinsi Jawa Timur (10 kabupaten), LPMP Propinsi NTB (2 kabupaten), LPMP Propinsi NTT (4 kabupaten), LPMP Propinsi Kalimantan Tengah (4 kabupaten), LPMP Propinsi Gorontalo (1 kota 1 kabupaten), LPMP Propinsi Sulawesi Tengah (4 kabupaten), LPMP Propinsi Sulawesi Selatan (1 kota 5 kabupaten), LPMP Propinsi Maluku (1 kota 1 kabupaten), LPMP Propinsi Maluku Utara (1 kota 1 kabupaten), dan LPMP Propinsi Papua/Papua Barat (1 kota 5 kabupaten)</p> <p>Pusat Pengembangan, Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPTK):</p> <p>PPPPTK Bahasa – Jakarta, PPPPTK IPA – Bandung, PPPPTK IPS – Malang, dan PPPPTK Matematika – Yogyakarta</p>
Kelompok Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen Dikti - Dana Insentif Akreditasi/Dana PJJ/Program S3/Training - Universitas/Para Dosen (26 universitas) 2. Badan Pembinaan SDMPK dan PMP (ex. Ditjen PMPTK) - Block Grant untuk Peningkatan Mutu dan Kinerja Guru melalui KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS, Forum KKG/MGMP (75 kabupaten) 3. Balitbang - Sekolah Dasar/Menengah/Madrasah/Guru/ Siswa dan Kemdikbud Pusat 4. LPMP (15 LPMP) 5. Propinsi (16 Propinsi) 6. Kabupaten/Kota (75 kabupaten/kota) 7. KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS, Forum KKG/MGMP (6,364 Kelompok Kerja)

Kinerja Pelaksanaan

Pada umumnya seluruh pekerjaan dapat memenuhi target, progres pekerjaan sampai dengan Triwulan II TA 2012 adalah sebagai berikut:

1. Dit. PTK DIKTI
Terdapat 4 (empat) proyek yang sedang berjalan: *Accr Incentive Grants*, *Distance Learning Development Grants*, *Overseas Fellowship S-3 Grants* dan *Overseas Short Term Course*, hampir kesemuanya berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi target.
2. Universitas Terbuka
Terdapat 2 (dua) proyek: Pengembangan Materi Pembelajaran Jarak Jauh dan Diseminasi/Sosialisasi Portal, seluruh proyek sudah selesai 100%.
3. Pusbang Prodik
Terdapat 3 (tiga) Proyek yang sedang berjalan: Program Induksi Guru, Penilaian Kinerja Guru, dan Pengembangan Keprofesian. Kemajuan ketiga proyek tersebut sudah mencapai 85%, dan diharapkan pada 2013 sudah selesai.
4. Pusbang Tendik
Hanya terdapat satu proyek: Program Induksi Guru Pemula. Proyek ini telah selesai 100%.
5. LPMP
Terdapat 2 (dua) proyek: *Working Group Grants (WGG)* dan *Training to Support WGG*. *Pertama*, WGG direncanakan akan melibatkan 6612 kepala keluarga, proyek ini sudah selesai 100%. *Kedua*, *Training to Support WGG* untuk 15 paket sudah selesai 100%.
6. P4TK
Hanya ada terdapat satu proyek: Support Training untuk 5 paket, dan sudah selesai 100%.
7. DIT P2TK DIKDAS
Terdapat 4 (empat) proyek: *Project Management Trainings*, *Training of NCT dan PCT*, *Individual Consultants*, dan *Firm Consultants*. *Pertama*, Project Management Trainings terdapat 3 paket yang sudah selesai 100%. *Kedua*, *Training of NCT dan PCT* terdapat 11 paket dan sudah selesai 100%. *Ketiga*, *Individual Consultants* untuk 72 mm sudah selesai 100%. *Keempat*, *Firm Consultants* untuk 160 mm sudah selesai 100%.
8. BAN-PT
Terdapat 2 (dua) proyek yang sedang berjalan: Akreditasi LPTK dan Penelitian Akreditasi Profesi Guru. *Pertama*, Akreditasi LPTK untuk 92 LPTK sudah selesai 100%. *Kedua*, Penelitian Akreditasi Profesi Guru sampai saat ini belum berjalan.
9. Puspendik
Terdapat 2 (dua) proyek: Penelitian Sertifikasi Guru (Test) dan Penelitian KKG-MGMP (Test). *Pertama*, Penelitian Sertifikasi guru sudah selesai 100%. *Kedua*, Penelitian KKG-MGMP sudah selesai 100%.

10. Puslitjak

Terdapat 4 (empat) proyek: Penelitian Sertifikasi Guru (Non-Test), Penelitian KKG-MGMP (Non-Test), Penelitian Kemangkiran Guru, dan Penelitian Dampak Dana Insentif Akreditasi. *Pertama*, Penelitian Sertifikasi Guru (Non-Test) untuk 1 paket sudah selesai 100%. *Kedua*, Penelitian KKG-MGMP (Non-Test) untuk 1 paket sudah selesai 100%. *Ketiga*, Penelitian Kemangkiran Guru untuk 1 paket sudah selesai 100%. *Keempat*, Penelitian Dampak Dana Insentif Akreditasi untuk 1 paket sudah selesai 100%.

11. PDSP

Pengelolaan Data Pendidik.

Rencana Tindak

Mengingat tahun tutup proyek direncanakan pada tahun 2013, maka satker harus mengoptimalkan pekerjaan dalam kurun waktu satu tahun ini. Oleh sebab itu, kendala-kendala yang terjadi seperti belum turunnya revisi DIPA diperlukan tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengajukan revisi DIPA ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.

5.1.3. Hibah Bank Dunia *Extending Telecommunication in Rural Indonesia*

Informasi Ringkas

Proyek ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan memfasilitasi akses publik terhadap internet khususnya di pedesaan, mengingat adanya tantangan yang besar dalam hal pemberian layanan ICT (*information and communications technology*) kepada penduduk di Indonesia yang tersebar di kurang lebih 17 ribu pulau.

Dalam rangka peningkatan layanan publik terhadap ICT, GBOPA (*Global Partnership Output Based Aid*) yang difasilitasi oleh Bank Dunia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sepakat untuk melaksanakan kerjasama melalui hibah *Extending Telecommunication in Rural Indonesia* dengan nilai sebesar USD 1,9 juta.

Proyek ini efektif pada tanggal 19 Juni 2009 dan akan berakhir masa lakunya pada tanggal 30 Juni 2013. Proyek ini akan memfasilitasi penyediaan akses internet dalam bentuk CAP (*Community Access Point*) yang selanjutnya disebut Wardes (Warung Internet Desa) di 112 lokasi yang tersebar di provinsi Jawa Barat (3 kabupaten) dan Banten (3 kabupaten) serta 110 lokasi di provinsi Lampung (11 kabupaten).

Pelaksanaan pembangunan Wardes atau CAP ini dilaksanakan melalui 2 bagian (*part*) dengan target total sebanyak 222 lokasi. *Part 1* dilaksanakan di provinsi Jawa Barat dan Banten dengan alokasi hibah sebesar USD 780 ribu, sedangkan *part 2* dilaksanakan di provinsi Lampung dengan alokasi sebesar USD 760 ribu dan sisanya dimanfaatkan untuk kontrak konsultan.

Kinerja Pelaksanaan

Sampai dengan triwulan ini, untuk *part 1* (Jawa Barat dan Banten) pelaksanaan proyek sudah mencapai 100% dari target total 112 lokasi di 3 kabupaten. Untuk *part 2* (Lampung), pelaksanaan proyek sudah mencapai 50% atau 55 lokasi dari target total 110 lokasi di 11 kabupaten. Total lokasi yang sudah melaksanakan penyediaan wardes mencapai 167 lokasi. Hasil pekerjaan yang sudah selesai tersebut sedang dimintakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk diverifikasi oleh *independent verification agent* guna memastikan bahwa wardes-wardes yang dibangun tersebut dapat berfungsi dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di pedesaan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait dengan kontrak *management consulting services* dan *communication specialist* adalah masa laku kontrak untuk kedua konsultan tersebut perlu segera diperpanjang mengingat pelaksanaan hibah masih akan berlangsung sampai tahun 2013. Konsultan tersebut dibutuhkan dalam kaitannya dengan proses administrasi, keuangan, supervisi, monitoring, publikasi maupun evaluasi pelaksanaan hibah.

Rencana Tindak

Proses verifikasi oleh *independent verification agent* untuk kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan dapat segera dilaksanakan, sehingga apabila ada kekurangan atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat segera meminta kontraktor untuk memperbaiki dan segera menyesuaikan dengan spesifikasi yang seharusnya. Selain itu, untuk memperlancar proses administrasi, keuangan, pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat segera memperpanjang kontrak konsultan, baik *management consulting services* maupun *communication specialist*.

5.1.4. Hibah ADB Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR)

Informasi Ringkas

Dalam rangka membantu keluarga miskin yang terkena dampak krisis ekonomi pada 1997-1998, pemerintah membagikan beras bagi keluarga miskin (raskin) untuk mengurangi prevalensi anemia di kalangan keluarga miskin (gakin). Berdasar hal tersebut *Asian Development Bank* (ADB) menyetujui akan memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui *Japan Fund for Poverty Reduction* (JFPR) sebuah proyek pengayaan (fortifikasi) zat besi kedalam beras untuk gakin. Ini merupakan pilot proyek yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karawang dan Bekasi. Proyek ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi masalah KGB (Kurang Gizi Besi) pada masyarakat miskin di Indonesia dengan menganalisis visibilitas, biaya dan dampak dari penyediaan beras yang telah difortifikasi dengan memanfaatkan program Raskin.

Kinerja Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadaan dan mendistribusikan 14.000 ton beras raskin yang telah difortifikasi kepada penerima manfaat (Rumah Tangga Miskin) sebanyak 80 desa di Kabupaten Karawang dan Bekasi pada tahun 2012.
- b. Melakukan uji coba dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas pencampuran dan penjaminan mutu dalam melakukan pencampuran premix dan Raskin pada tingkat homogenitas yang diharapkan.
- c. Melakukan pencetakan label untuk digunakan saat pengangkutan Raskin yang difortifikasi.
- d. Melakukan operasional pencampuran beras premix dengan Raskin di penggilingan (UPGB) milik Perum Bulog dan Swasta.

Output yang dihasilkan dari proyek ini adalah tersedianya pengadaan dan terdistribusikannya 14.000 ton beras raskin yang telah difortifikasi kepada penerima manfaat (Rumah Tangga Miskin) sebanyak 80 desa di Kabupaten Karawang dan Bekasi pada tahun 2012.

5.1.5. Hibah Bank Dunia *Government Partnership Facility*, CEC Corruption Prevention

Informasi Ringkas

Proyek ini efektif pada tanggal 29 Oktober 2009 sampai dengan 31 Oktober 2013 dengan *executing agency* adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal-hal yang menjadi latar belakang dari proyek ini adalah:

- a. Pengaduan masyarakat dan penilaian kepuasan pelanggan sudah mulai menjadi bagian penting dari pengembangan layanan publik, namun masih belum berkembang dengan baik. Tindak lanjut terhadap keluhan, tingkat partisipasi publik dan efektivitas sistem pengaduan masyarakat masih belum sesuai.
- b. Pengaduan masyarakat dan penilaian kepuasan pelanggan tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
- c. Kerahasiaan pelapor belum dilindungi. Khususnya di area Pendidikan (program dana BOS) dan BPN.

Tujuan dari proyek ini adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas dari sistem wajib belajar di Indonesia melalui partisipasi masyarakat dengan memasang sistem pengaduan dan penilaian kepuasan masyarakat, dengan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi pelayanan publik sesuai dengan standar minimal
- b. Menjadikan database pengaduan masyarakat

- c. Mengurangi biaya pungutan liar dan kebocoran anggaran di area pendidikan dan Pelayanan publik

Kinerja Pelaksanaan

Pada pelaksanaan proyek ini terdapat beberapa proses kegiatan, yaitu: sosialisasi pengaduan tentang penyelewengan penggunaan dana BOS yang ditargetkan kepada Manager BOS, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru dan Komite Sekolah. Selain pertemuan tersebut dilakukan juga dengan pemasangan *sign board* dan poster di setiap 10 Sekolah di 20 Kota pelaksanaan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi Penggunaan dana BOS secara benar sesuai dengan Permendikbud no 51 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengukur kinerja pelaksanaan, output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Penerapan sistem pengaduan masyarakat.
- b. Sosialisasi penyaluran dana dan aturan bagaimana menggunakan dana BOS untuk umum.
- c. Pelaksanaan tingkat kepuasan pelanggan sistem evaluasi pelayanan publik.
- d. Pembentukan koneksi antara KPK dan database pengaduan masyarakat.
- e. Pelaksanaan Sistem Kepuasan Pelanggan untuk Layanan BPN.
- f. Implementasi Sistem Pengaduan Masyarakat untuk BPN.

Rencana Tindak

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan terus melakukan kontrol dan diskusi dengan masyarakat untuk menampung keluhan-keluhan guna memastikan penggunaan dana BOS yang benar.

5.1.6. Hibah MDF dan Bank Dunia IRFF-AF

Informasi Ringkas

Gempa bumi dengan kekuatan 9,2 SR terjadi di 150 km lepas pantai barat Sumatera dan memicu serangkaian tsunami setinggi 30 meter yang menewaskan 230.000 dan menghancurkan infrastruktur masyarakat pesisir. Pada awal tahun 2010 Bank Dunia, Pemerintah Provinsi Aceh, dan pemerintah Pusat menambahkan suatu program rekonstruksi pada ruas jalan nasional Calang – Meulaboh (jalan pantai barat) dari Km 198 sampai Km 248 yang dalam lingkungannya meliputi: jembatan Kuala Bubon, jalan, jembatan dan lingkungan sekitarnya yang rusak akibat tsunami pada tahun 2004, serta termasuk juga jasa rekayasa untuk desain review, supervise pelaksanaan jalan pantai barat, dan manajemen program. Program tambahan dari IRFF ini dinamakan

IRFF AF (*Infrastructure Reconstruction Financing Facility-Additional Financing*) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kinerja Pelaksanaan

Pekerjaan konstruksi pada proyek ini terdiri atas 4 paket yaitu: Paket JNB 1, Paket JNB 2, Paket JNB 3, dan Paket JNB 4. Paket JNB 1, JNB 2, dan JNB 3 mengalami permasalahan terkait pekerjaan drainase dan struktur yang lambat sedangkan paket JNB 4 mengalami permasalahan terkait penyediaan tiang pancang yang terlambat dari Jakarta. Sehubungan dengan permasalahan tersebut pihak pelaksana telah menambahkan anggota team dan melakukan percepatan proses pemancangan. Overall pekerjaan konstruksi pada keempat paket tersebut mencapai di atas 80%.

Tabel 15. Pencapaian Indikator Kinerja Output Hibah *Infrastructure Reconstruction Financing Facility - AF*

Masa Laku : 13/08/2010 – 31/12/2012

No	Indikator Output	Target Total	Satuan	TA 2012		
				Target	Realisasi s.d TW II	%
1	Construction of Road: Lueng Gayo - Arongan Lambalek Km 198 to 216	18	Km	14,5	6,0	41,0%
2	Construction of Road Arongan Lambalek - Gampong Suak Breuh Km. 216 to Km 228	12	Km	9,3	4,0	42,6%
3	Construction of Road Gampong Suak Breuh - Simpang Kisaran/Meulaboh Km. 228 to Km 247	19	Km	15,3	6,2	40,5%
4	Construction of Kuala Bubon Bridge Km. 233 + 750 - Km 2234 + 550	2	Jembatan	1,5	0,5	34,6%
5	Consulting Services	7	Paket	5,4	2,1	38,7%
6	Incremental Operating Costs (IOC)	1	Paket	0,7	0,3	37,5%

5.1.7. Hibah UNDP *Barrier Removal to The Cost Effective Development and Implementation of Energy Efficiency Standards and Labeling (BRESL)*

Informasi Ringkas

Latar belakang dari proyek ini adalah Meniadakan hambatan berkaitan dengan pengembangan dan implementasi program konservasi energi melalui standarisasi dan pelabelan peralatan hemat energi antara lain lampu (compact fluorescent lamp, CFL), kipas angin (fan), ballast, AC, motor, lemari es (refrigerator), dan rice cookers.

Tujuan yang ingin dicapai oleh proyek BRESL ini adalah menanggulangi dampak perubahan iklim global melalui program penghematan energi antara lain melalui:

- a. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GHG) 1,52 juta metric ton CO₂ dan pengurangan energi listrik di perumahan, komersial dan sektor industri secara total 2,009 GWh.
- b. Tercapai pengembangan keharmonisan standar dan prosedur secara regional.
- c. Secara menyeluruh diperkirakan proyek regional BRESL akan mengurangi emisi karbon sekitar yang 23,4 juta metrik ton per tahun dan secara kumulatif akan berkurang sekitar 34,5 juta metrik ton pada akhir proyek.

Kinerja Pelaksanaan

Dalam rangka pengukuran kinerja pelaksanaan proyek ini, output yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan dan peraturan yang mempromosikan penggunaan teknologi hemat energi pada peralatan rumah tangga.
- b. Meningkatkan kapasitas lembaga dan individu untuk mendukung implementasi kebijakan terkait standard dan pelabelan hemat energi.
- c. Penyediaan informasi dan dukungan teknis kepada produsen peralatan yang ditargetkan.
- d. Kerjasama regional dan sharing informasi guna memaksimalkan dampak (negara anggota BRESL meliputi: Banglades, China, Indonesia, Pakistan; Thailand dan Vietnam).
- e. Memperlihatkan contoh berbagai aspek pengembangan dan implementasi program standard dan pelabelan hemat energi.

Rencana Tindak

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghematan energi dalam upaya menanggulangi dampak perubahan iklim global serta melakukan peningkatan ketersediaan informasi mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca dan dampak yang dapat ditimbulkan.

BAB VI

Evaluasi Laporan Proyek Yang Telah Selesai

6.1. PCR Pinjaman ADB 2184-INO *Road Rehabilitation-2*

Road Rehabilitation-2 ditujukan untuk mendukung rehabilitasi dan peningkatan jalan strategis nasional di Sumatera dan Kalimantan, khususnya ruas jalan yang kondisinya buruk di 10 provinsi (6 provinsi di Sumatera dan 4 provinsi di Kalimantan) dan merupakan bagian dari trans-pulau koridor dan melayani perdagangan antar dan lalu lintas lokal. Proyek ini juga termasuk langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga pusat dan provinsi untuk menjaga dan melindungi permukaan jalan dan mengurangi resiko kecelakaan di daerah yang kepadatan lalu lintasnya tinggi.

Gambaran umum mengenai proyek Pinjaman ADB 2184-INO *Road Rehabilitation-2* adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 16. Gambaran Umum 2184-INO *Road Rehabilitation-2*

Gambaran Umum	
Kode Proyek	2184-INO
Nama Proyek	Road Rehabilitation-2
Instansi Penanggung Jawab	Directorat General of Highways
Nilai Pinjaman	\$ 151.000.000
Appraisal	
- Date Started	8 September 2004
- Date Completed	24 September 2004
Loan Negotiation	
- Date Started	31 Mei 2005
- Date Completed	2 Juni 2005
Tanggal Efektif	12 September 2006
Tanggal Tutup	31 Desember 2010

Pelaksanaan proyek ini terdiri atas 3 komponen, yaitu: (i) pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan yang meliputi rehabilitasi atau perbaikan 1.292 kilometer dari jalan nasional serta penggantian atau pelebaran 40 jembatan; (ii) Mendukung pelaksanaan kebijakan sektor yang meliputi instalasi Jembatan timbang untuk mengontrol truk *overloading*, pengembangan pendekatan baru untuk manajemen pemeliharaan jalan serta pelaksanaan kampanye kesadaran keselamatan jalan; (iii) pengembangan kapasitas dan pelatihan yang meliputi pelatihan dalam manajemen

proyek dan rekayasa dukungan, dan penguatan kemampuan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan sosial.

Dengan merehabilitasi dan memperbaiki 1.292 km jalan pada jaringan jalan strategis nasional, proyek ini diharapkan untuk meningkatkan mobilitas, perdagangan, investasi, pertumbuhan ekonomi, dengan demikian membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat kohesi nasional.

Pencapaian output pada proyek ini terdiri atas 3 bagian, yaitu: (i) jalan dan jembatan, (ii) dukungan untuk kebijakan sektor jalan, dan (iii) pengembangan kapasitas dan pelatihan. Pencapaian output jalan dan jembatan adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 17. Pencapaian Output Jalan dan Jembatan

Lokasi	Rehabilitasi Jalan			Pembangunan Jembatan		
	RRP*	Target Revisi	Realisasi	Rencana	Kontrak	Realisasi
Sumatera	653,7	551,5	551,5	19	20	20
Kalimantan	638,8	593,6	593,6	21	21	21
Total	1.292,5	1.145,1	1.145,1	40	41	41

*RRP (*Report and Recommendation of President*)

Terkait dengan pencapaian output dukungan untuk kebijakan sektor jalan, telah dilakukan (i) Pengendalian beban truk yang melintas, (ii) kampanye kesadaran akan keselamatan di jalan raya, serta (iii) pengaturan pemeliharaan jalan. Sedangkan dalam rangka pengembangan kapasitas melalui pelatihan, Bina Marga telah melakukan pelatihan *Project Management and Engineering Support Practices* (PMES) dengan peserta 193 orang serta *Strengthening of Capabilities in Environment and Social Impact Management* (SCESIM) dengan jumlah peserta 398 orang.

Penilaian kinerja juga dilakukan terhadap konsultan, kontraktor dan supplier. Kinerja konsultan yang direkrut pada umumnya dapat dikategorikan *satisfactory*. Namun, terdapat kinerja yang tidak merata dalam hal kualitas antara staf *Design and Supervision Consultant* (DCS) yang ditugaskan untuk mengawasi konstruksi di lapangan. Demikian halnya untuk kinerja kontraktor dan supplier untuk pra atau pasca kualifikasi memiliki pengalaman yang sesuai dalam bidangnya dan umumnya menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Proyek ini relevan dengan RPJM 2004-2009 yang menekankan pembangunan infrastruktur melalui layanan yang lebih efisien dan partisipasi sektor swasta yang lebih besar. Proyek ini mampu meningkatkan akses kendaraan di jalan-jalan strategis nasional Sumatera dan Kalimantan, mengurangi waktu tempuh seperti pada *link* 35 dan Link 36 di Kalimantan Selatan telah memotong waktu perjalanan 50 km atau

sekitar 30%, serta mengurangi tarif transportasi. Dengan demikian proyek ini dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan *Economic Internal Rate of Return* (EIRR) dari 19 subproyek adalah antara 10,3% dan 49,9% sehingga proyek ini dinilai efisien. Kekhawatiran terbesar dari keberlanjutan manfaat proyek ini adalah lemahnya penegakan hukum terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas dan memiliki berat melebihi batas. Terkait hal tersebut pemerintah daerah sedang membuat peraturan yang lebih efektif, bahkan di provinsi Kalimantan Selatan telah disediakan jalur tersendiri bagi truk yang membawa batu bara dan material sehingga tidak melewati jalan nasional tersebut.

Meskipun proyek ini tertunda pada awal pelaksanaan, terutama pada proses prakualifikasi yang berlarut-larut, namun proyek dapat diselesaikan pada tanggal penutupan pinjaman.

Dalam rangka monitoring pencapaian output pada proyek 2184-INO *Road Rehabilitation-2* digunakan *Design and Monitoring Framework* seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 18. Design and Monitoring Framework Road Rehabilitation-2

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Civil Work		
	Rekonstruksi dari 436 kilometer jalan; resurfacing dan pelebaran 807 km, penggantian atau pelebaran 26 jembatan	Menurunkan indeks kekasaran perkerasan sampai kurang dari 5 m / km	Meskipun tidak ada IRI maksimum diberikan dalam dokumen kontrak untuk permukaan jalan jadi, tujuan menurunkan kekasaran perkerasan sampai kurang dari 5 m / km umumnya tercapai.
2	Road Sector Policy		
2.1a	Penguatan kontrol atas truk overloading	Pemasangan 1 jembatan timbang di Sumatera dan 3 di Kalimantan dan operasi yang efektif di bawah manajemen sektor swasta.	BAPPENAS, melalui tim konsultan dalam negeri, akan menyelidiki situasi yang ada dan merumuskan metode perbaikan.
2.1b	Penyediaan peralatan untuk menegakkan batas gandar kendaraan beban.		
2.2	Kesadaran yang Lebih baik akan masalah keselamatan di jalan	Secara aktif terlibat dan tokoh masyarakat yang terinformasikan dengan lebih baik Perubahan perilaku pengguna jalan	Bersama dengan kampanye kesadaran yang ditujukan kepada pengguna jalan, Dirjen Perhubungan Darat juga memprakarsai pembentukan kelompok masyarakat untuk penyebaran kesadaran keselamatan jalan.
2.3	Pengembangan pendekatan baru untuk manajemen pemeliharaan jalan	Diagnostik penilaian badan jalan Review dari sarana yang ada dan metode pemeliharaan jalan Pengembangan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan baru dan prosedur manajemen	Ruang lingkup diperluas untuk mencakup pendekatan baru untuk pengembangan Integrated Transportation Management and System (iTMS), yang tidak akan terbatas pada sektor jalan tetapi juga akan mencakup strategi pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan sistem transportasi negara itu.

No	Indikator	Target	Realisasi
3	Capacity Building and Training		
3.1	Pelatihan praktek dukungan manajemen proyek dan teknik	Pelatihan 400 staf P2JN	Pelatihan ini diikuti oleh 193 staf Ditjen Bina Marga. Pelaksanaan pelatihan serupa oleh Ditjen Bina Marga di bawah berbagai sumber pendanaan menyumbang tingkat partisipasi yang relatif rendah. Program pelatihan memperkenalkan manajemen proyek terbaru termasuk Berbasis Kinerja Kontrak Manajemen.
3.2	Penguatan manajemen dampak lingkungan dan sosial	Pelatihan 300 staf dari departemen lingkungan dan hutan	10 Program pelatihan dan 4 lokakarya telah dilakukan di 10 provinsi di Sumatera dan Kalimantan, yang dihadiri oleh sebanyak 398 staf berbagai instansi. Beberapa sub-proyek digunakan sebagai studi kasus dalam program pelatihan.

Beberapa hal yang menjadi *lesson learned* dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk proyek sejenis perlu memperhatikan kemungkinan waktu dan biaya tambahan untuk rekonstruksi ruas jalan di daerah dengan kondisi geografis yang sulit.
- b. Perlu untuk menjaga kualitas konsultan apabila dilakukan pergantian personel.
- c. Perlu untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengendalikan *overloading* kendaraan.
- d. Mengingat pentingnya pemeliharaan perlu untuk melaporkan pengeluaran pemeliharaan rutin dan periodik. Selain itu, beban sumbu kendaraan dan efek dari truk *overloading* pada kehidupan investasi jalan harus dipantau secara berkala.
- e. *Start-up delay* tetap menjadi masalah untuk diselesaikan tidak hanya dalam proyek ini tetapi juga di sebagian besar proyek yang didanai ADB. Dalam proyek-proyek masa depan, *start-up delay* dapat diminimalkan jika administrasi dan pengawasan proyek-proyek dilakukan lebih ketat serta melaksanakan *Advance Procurement Action*.

6.2. ICR Pinjaman Bank Dunia 4790-IND *Initiatives for Local Governance Reform*

Tujuan pembangunan proyek adalah untuk mendukung percontohan untuk kabupaten pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan praktek partisipatif masyarakat dan dalam melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan. Gambaran umum mengenai proyek Pinjaman Bank Dunia 4790-IND *Initiatives for Local Governance Reform* dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 19. Gambaran Umum 4790-IND Initiatives for Local Governance Reform

Gambaran Umum	
Kode Proyek	4790-IND
Nama Proyek	Initiatives for Local Governance Reform
Instansi Penanggung Jawab	Kementerian Dalam Negeri
Nilai Pinjaman	\$ 29.500.000
Appraisal	
- Date Started	20 Januari 2004
- Date Completed	9 Juni 2005
Tanggal Efektif	7 April 2006
Tanggal Tutup (awal)	30 September 2009
Tanggal Tutup (revisi)	30 September 2011

Proyek ini terdiri atas 3 komponen, yaitu:

- a. Komponen A: Local Governance Reform (USD 1,3 juta) untuk terus mendukung kabupaten yang telah berpartisipasi dalam persiapan proyek (batch 1, sekitar 15 kabupaten).
- b. Komponen B: Poverty Targeted Investment (USD 31,2 juta) guna menyediakan pembiayaan tambahan untuk sekitar 15 kabupaten (batch 1) untuk pembiayaan yang bersifat *pro poor* yang diidentifikasi dan diprioritaskan melalui proses perencanaan terkait dengan pengembangan PRSAPs (*Poverty reduction strategies/plans*) kabupaten.
- c. Komponen C: Implementation Support (USD 13,6 juta) untuk mendanai khusus kegiatan teknis dan memantau kegiatan dalam komponen A dan B di tingkat kabupaten, regional dan nasional.

Dalam mengukur pencapaian output digunakan *Project Development Objective* sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 20. Project Development Objective 4790-IND Initiatives for Local Governance Reform

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Sejauh mana rekomendasi dari konsultasi / dengar pendapat publik yang dimasukkan ke dalam rancangan, maupun peraturan (Perda).	Sejauh mana rekomendasi dari konsultasi / dengar pendapat publik yang dimasukkan ke dalam rancangan, maupun peraturan (Perda).	Konsultasi publik mengenai rancangan anggaran daerah dan peraturan telah dilakukan di sedikitnya 12 kabupaten.
2	Ketersediaan informasi publik yang lebih mengenai keuangan dan pengadaan.	Ketersediaan informasi publik yang lebih mengenai keuangan dan pengadaan.	Ringkasan dari anggaran daerah dan laporan akuntabilitas, serta rencana pengadaan kabupaten dengan nilai kontrak yang diperkirakan, diumumkan di sedikitnya 12 kabupaten.

No	Indikator	Target	Realisasi
3	Setidaknya 10 anggaran daerah menunjukkan peningkatan pengeluaran untuk kemiskinan pada akhir proyek.	12 kabupaten menunjukkan peningkatan dalam pengeluaran untuk kemiskinan pada akhir proyek	Sedikitnya 4 kabupaten telah meningkatkan target belanja untuk kemiskinan 2010, dibandingkan tahun 2008.
4	EIRR untuk proyek infrastruktur yang didanai.	EIRR untuk infrastruktur proyek yang didanai melebihi 15%.	Rata-rata EIRR adalah 24,6%.
5	Setidaknya 10 pemerintah kabupaten berlatih standar yang diterima untuk pengadaan sebagaimana yang dijabarkan oleh audit	Setidaknya 10 pemerintah kabupaten berlatih standar yang diterima dari pengadaan sebagaimana yang dijabarkan oleh audit	Lebih dari 10 kabupaten berlatih standar yang diterima.
6	Setidaknya 10 pemerintah kabupaten berlatih manajemen keuangan yang baik sebagaimana yang dijabarkan oleh audit dan studi pada akhir proyek	Setidaknya 10 pemerintah kabupaten berlatih manajemen keuangan sebagaimana yang dijabarkan oleh audit dan studi pada akhir proyek	14 pemerintah kabupaten berlatih manajemen keuangan
7	% Peningkatan kepuasan stakeholder dengan pelayanan pemerintah.	N.A.	rata-rata tingkat kepuasan 82% untuk 5 pelayanan publik yang paling umum digunakan di 14 kabupaten.

Secara umum kinerja *executing agency*, dan pemberi pinjaman dapat dikategorikan *moderately satisfactory*, demikian juga halnya dengan pencapaian *outcome* yang dihasilkan dapat dikategorikan *moderately satisfactory*.

BAB VII

Penutup

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pinjaman luar negeri Triwulan II TA 2012, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total nilai pinjaman luar negeri berjumlah USD 24.486,9 juta. Nilai pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman program sebesar USD 443,0 juta (1,8%) dan pinjaman proyek sebesar USD 24.043,9 juta (98,2%) yang terdiri dari mekanisme pinjaman lunak sebesar USD 11.525,1 juta, mekanisme Fasilitas Kredit Ekspor sebesar USD 5.630,6 juta dan mekanisme *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) sebesar USD 6.888,2 juta.
2. Realisasi penarikan pinjaman program sampai dengan Triwulan II TA 2012 mencapai 65,9% sedangkan realisasi penarikan pinjaman proyek mencapai 19,1% dari target.
3. Kinerja penyerapan tahunan lembaga/negara pemberi pinjaman yang paling tinggi berturut-turut adalah Bank Dunia (27,3%), JICA (25,4%) dan ADB (23,5%). Sedangkan kinerja penyerapan tahunan tertinggi untuk *executing agency* berturut-turut adalah PT. PGN (71,7%), Kementerian Komunikasi dan Informatika (71,2%), dan Kementerian Kesehatan (48,8%).
4. Permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman proyek luar negeri Triwulan II TA 2012 yang mempengaruhi kinerja proyek adalah masalah finansial, pengadaan barang/jasa, penerbitan NOL, backlog, DIPA dan pembebasan lahan.
5. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri pada Triwulan II TA 2012 diantaranya adalah CPRM (*Country Portfolio Review Mission*) ADB 2012, *Country Performance Portfolio Review* (CPPR) Bank Dunia, dan *Islamic Development Bank* (IDB) *Procurement Workshop and Clinics*.
6. Pada TA 2012, diproyeksikan terdapat 20 Kementerian/Lembaga yang mengelola hibah luar negeri dengan nilai sebesar Rp. 6.044,2 miliar. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pagu TA 2011 yaitu sebesar Rp. 7.466,4 miliar.
7. Penyelesaian *Project Completion Report* adalah 6 bulan setelah proyek tersebut berakhir masa lakunya. Pada edisi Triwulan II TA 2012 dibahas 2 laporan yaitu proyek pinjaman ADB 2184-INO *Road Rehabilitation-2* yang dikategorikan *satisfactory* dan pinjaman Bank Dunia 4790-IND *Initiatives for Local Governance Reform* yang dikategorikan *moderately satisfactory*.

7.2. Saran

Upaya dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan *joint monitoring* dengan *development partners* lain di luar Bank Dunia, ADB, JICA dan IDB, yang melibatkan tidak hanya instansi penanggung jawab namun juga pihak terkait lainnya (Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, BPKP).
2. Mendorong penyelesaian masalah yang menghambat proses pengadaan barang dan jasa, antara lain adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Indonesia terhadap prosedur yang digunakan, dilakukannya *advance procurement action* dan standardisasi dokumen tender (*bidding document*). Selain itu juga dapat melalui koordinasi dengan LKPP terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
3. Mendorong instansi penanggung jawab pelaksana proyek pinjaman luar negeri untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi keuangan dalam pengajuan pembayaran sehingga tidak terjadi *irregularities* dan dapat menurunkan angka *backlog*.
4. Perlu kebijakan khusus pada proyek-proyek yang proses pembebasan lahannya telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No 2 Tahun 2012.
5. Mengintensifkan komunikasi antara pemerintah, instansi penanggung jawab dan pihak DPR agar persetujuan DIPA SLA dapat dilakukan di awal pembahasan anggaran.